



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance*
terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

SKRIPSI

HENDRA PUTRA IRAWAN

0906607983

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance*
terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

HENDRA PUTRA IRAWAN

0906607983

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.**

Nama : Hendra Putra Irawan

NPM : 0906607983

Tanda Tangan :



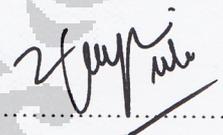
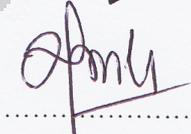
Tanggal : 13 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hendra Putra Irawan
NPM : 0906607983
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi
• Indonesia : Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan
• Inggris : The Effect Of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	: Dr. Fitriany, S.E., M.Si., Ak.	()
Pembimbing	: Aria Farahmita, Ak., CPA., MSM	()
Anggota Penguji	: Nurul Husnah, S.E., Ak., M.S.Ak.	()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 13 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi



Sri Nurhayati, M.M., SAS.
NIP 19600317198602 2 001

KATA PENGANTAR

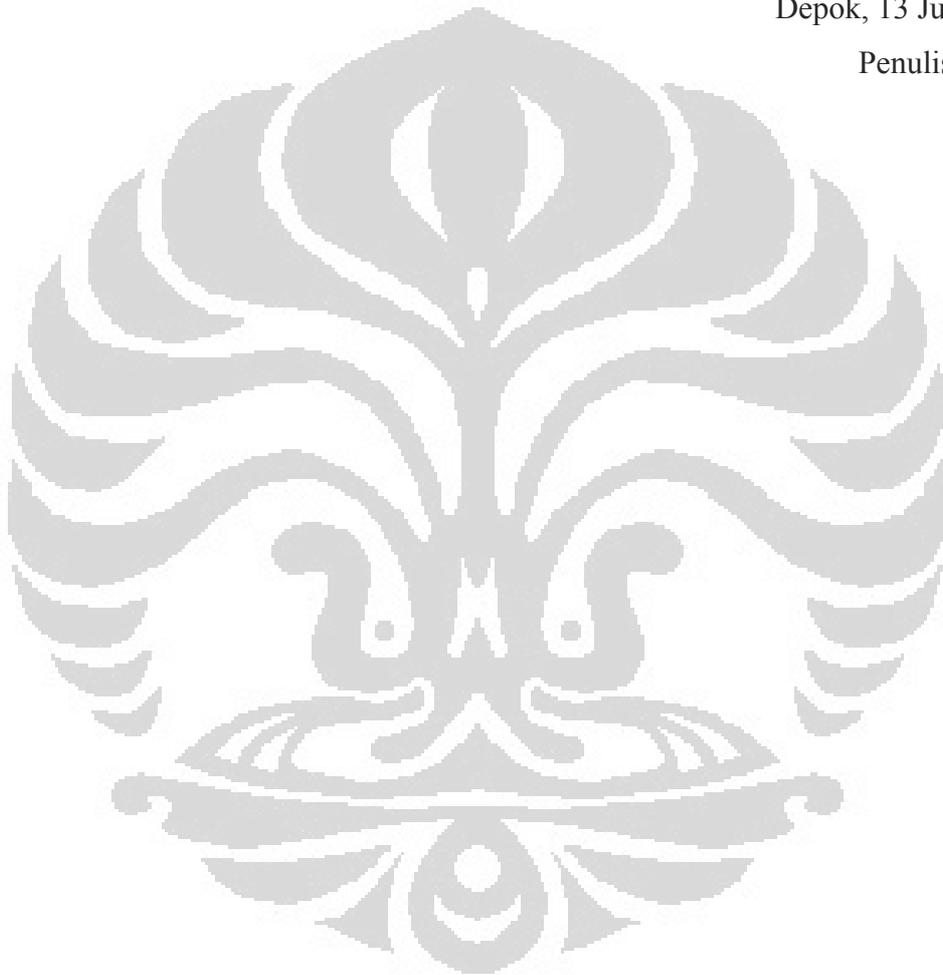
Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT karena dengan berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ini. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak dari awal perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Nurhayati, M.M., SAS, selaku Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi UI.
2. Ibu Aria Farahmita, Ak., CPA., MSM., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan pada penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Fitriany, S.E., M.Si., Ak. dan Ibu Nurul Husnah, S.E., Ak., M.S.Ak. selaku dewan penguji yang memberi masukan terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Alm. Ayahanda Zulkifli Abdullah dan Ibunda Rohana yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
5. Kak Rita dan Bang Furqan, Kak Eva dan Bang Zul serta Kak Yeni dan Bang Fahmi yang selalu memberikan nasihat dan semangat.
6. Keponakan penulis Miqdad, Jauhar, Nabila, Haikal, Rais, dan *new born* Najwa dan Rafan.
7. Aa Didit yang selalu keras menyemangati dan memberikan arahan serta berbagi pengalaman yang baik. Semoga dapat penulis jadikan pengalaman berharga.
8. Pak Iqbal, Pak Romy, Pak Setyawan, dan Pak Wawan selaku atasan di tempat penulis bekerja yang memberikan kebijakan waktu dan semangat dalam menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman di Bagian TIK BPPK yang memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan di UI. Semoga kita dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya :D

10. Anshor dan Febi telah banyak memberikan semangat walau kita tak lulus bersamaan. Serta teman-teman semasa kuliah di Program Ekstensi FEUI 2009.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Depok, 13 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Putra Irawan
NPM : 0906607983
Program Studi : Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

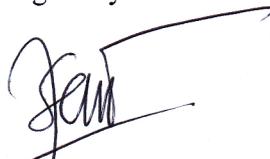
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
pada tanggal 13 Juli 2012
yang menyatakan



(Hendra Putra Irawan)

ABSTRAK

Nama : Hendra Putra Irawan
Program Studi : Sarjana Ekstensi Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Penelitian ini menganalisa pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan dan memberikan beberapa kontribusi terhadap literatur penelitian tentang CG. Pertama, penelitian ini menguji kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi sebagai mekanisme penerapan CG dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui upaya manajemen pajak. Kedua, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini merupakan pertama di Indonesia yang menginvestigasi hubungan kompensasi manajerial terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh direksi secara signifikan mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Tetapi, besaran kompensasi terhadap direksi tidak mengurangi pembayaran pajak perusahaan dan nampaknya bukan unsur yang efektif untuk manajemen pajak. Penerapan CG juga tidak berdampak terhadap pengurangan pembayaran pajak karena CG mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan pajak.

Kata kunci:

Cash ETR, Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Saham Direksi, Kompensasi Direksi, Kompensasi Manajemen, Manajemen pajak

ABSTRACT

Name : Hendra Putra Irawan
Study Program : Undergraduate of Accountancy
Title : The Effect of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management

This study investigates how corporate governance influences tax management behavior and contributes the literature on CG. First, this study examines directors compensation and directors ownership, as CG mechanism of a firm, in managing taxes to increase performance. Second, as long as we know, this is the first study in Indonesia investigating the link between managerial compensation to tax management. This study finds that directors ownership exhibits a significance relationship in reducing cash tax paid. But, directors compensation does not result lower taxes paid and it seems not an effective mechanism in engaging tax management. CG mechanism also can not result lower taxes paid because CG induces managers to be more carefully in tax management.

Keywords:

Cash ETR, Corporate governance, Director compensation, Director ownership, Management compensation, Managerial ownership, Tax management

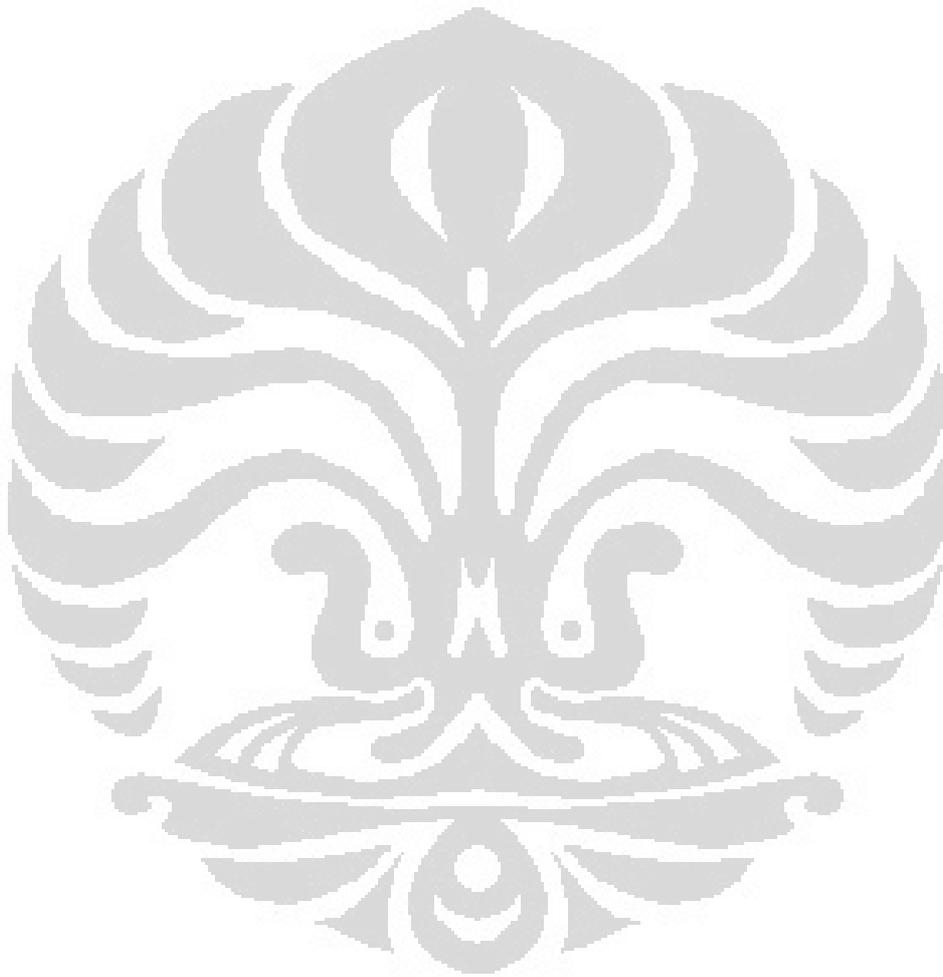
DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat dan Kontribusi Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .	8
2.1 Teori Keagenan	8
2.2 Manajemen Pajak	10
2.2.1 Pengertian	10
2.2.2 Tujuan Manajemen Pajak	12
2.2.3 Pengukuran Manajemen Pajak	13
2.2.4 Pengaruh Masalah Agensi (<i>Agency Problem</i>) Terhadap Manajemen Pajak	13
2.3 <i>Corporate Governance</i> (CG)	15
2.3.1 Pengertian	15
2.3.2 Prinsip <i>Corporate Governance</i>	16

2.3.3	Tujuan dan Manfaat Penerapan <i>Corporate Governance</i>	19
2.3.3.1	Tujuan <i>Corporate Governance</i>	19
2.3.3.2	Manfaat <i>Corporate Governance</i>	20
2.3.4	Pengukuran <i>Corporate Governance</i>	22
2.3.5	Hubungan <i>Corporate Governance</i> dan Agency Problem Serta Kaitannya Dengan Manajemen Pajak	23
2.4	Pengembangan Hipotesis Penelitian	24
2.4.1	Pengaruh Paket Kompensasi Direksi terhadap Manajemen Pajak	24
2.4.2	Pengaruh Penerapan CG terhadap Manajemen Pajak.	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		27
3.1	Kerangka Penelitian	27
3.2	Model Penelitian	28
3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian	28
3.3.1	Variabel Dependen (Tingkat Pajak Efektif)	28
3.3.2	Variabel Independen	29
3.3.2.1	Kompensasi	29
3.3.2.2	Kepemilikan Saham Direksi	30
3.3.2.3	Penerapan <i>Corporate Governance</i>	30
3.3.3	Variabel Kontrol	31
3.4	Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
3.4.1	Pengumpulan Data	33
3.4.2	Pengolahan Data	34
3.4.2.1	Metode <i>Common Effect (Pooled Ordinary Least Square)</i>	35
3.4.2.2	Metode <i>Fixed Effect (Fixed Effect Model - FEM)</i>	35
3.4.2.3	Metode <i>Random Effect (Random Effect Model – REM)</i>	35
3.4.3	Pemilihan Model Estimasi	36
3.5	Pengujian Model	36
3.5.1	Pengujian Statistik	36

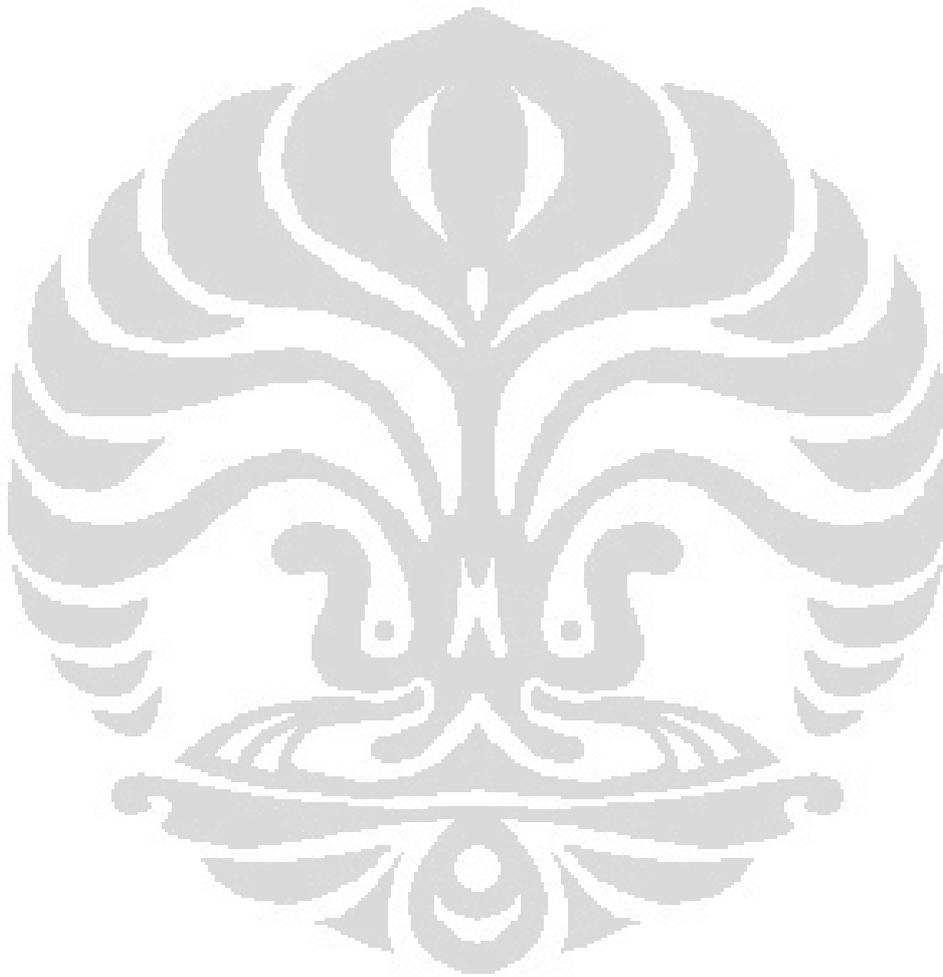
3.5.2	Pengujian Ekonometrika	37
3.5.2.1	Uji Multikolinearitas	38
3.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas	38
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	38
3.5.2.4	Uji Normalitas	39
3.6	Aplikasi Statistik	39
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Sampel Penelitian	40
4.2	Statistik Deskriptif	41
4.3	Pemilihan Metode Estimasi	43
4.3.1	Uji <i>Chow</i>	43
4.3.2	Uji <i>Hausman</i>	44
4.4	Pengujian Asumsi Klasik Ekonometrika	44
4.4.1	Uji Multikolinearitas	44
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	44
4.4.3	Uji Autokorelasi	45
4.4.4	Uji Normalitas	46
4.5	Pengujian Model	46
4.6	Pengujian Hipotesis	47
4.6.1	Pengujian Hipotesis 1 (H_1)	47
4.6.2	Pengujian Hipotesis 2 (H_2)	49
4.6.3	Pengujian Hipotesis 3 (H_3)	49
4.6.4	Hasil Terhadap Variabel Kontrol	50
4.7	Pembahasan Penelitian	50
4.7.1	Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	50
4.7.2	Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	51
4.7.3	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	52
4.7.4	Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan Penelitian	55
5.2 Implikasi Penelitian	56
5.3 Keterbatasan Penelitian	57
5.4 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya	57
DAFTAR REFERENSI	59
LAMPIRAN	61



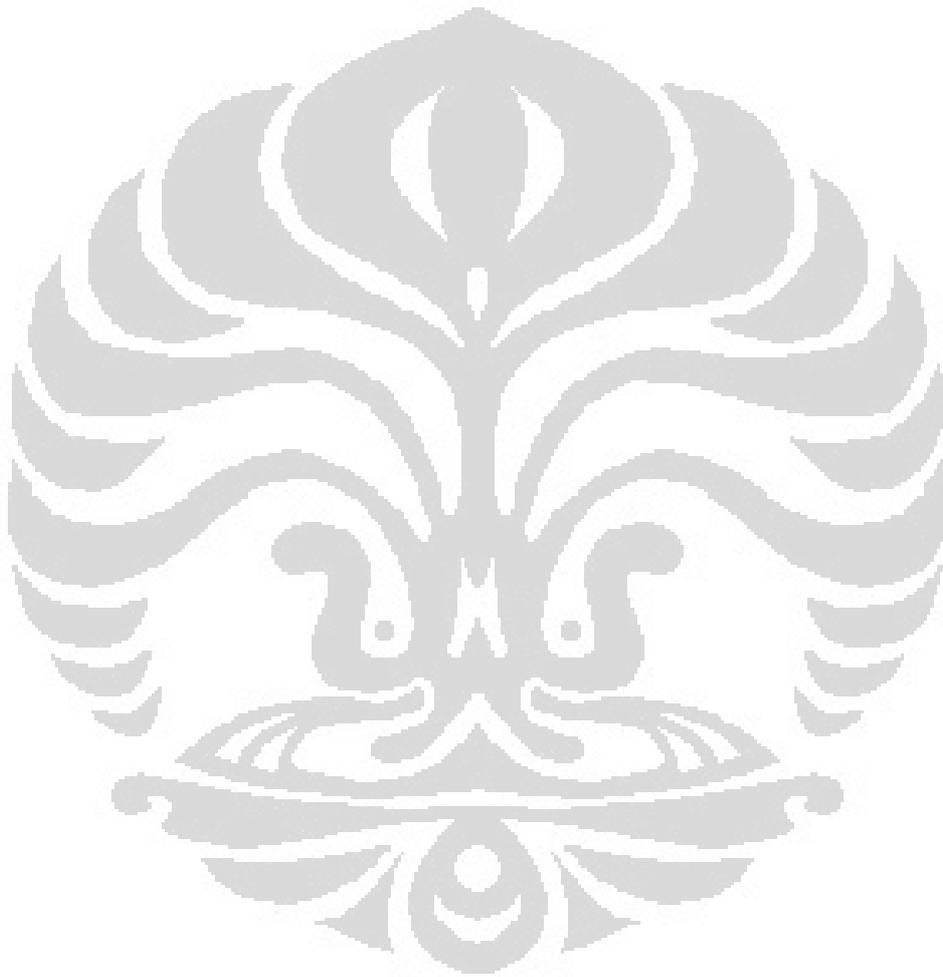
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran	27



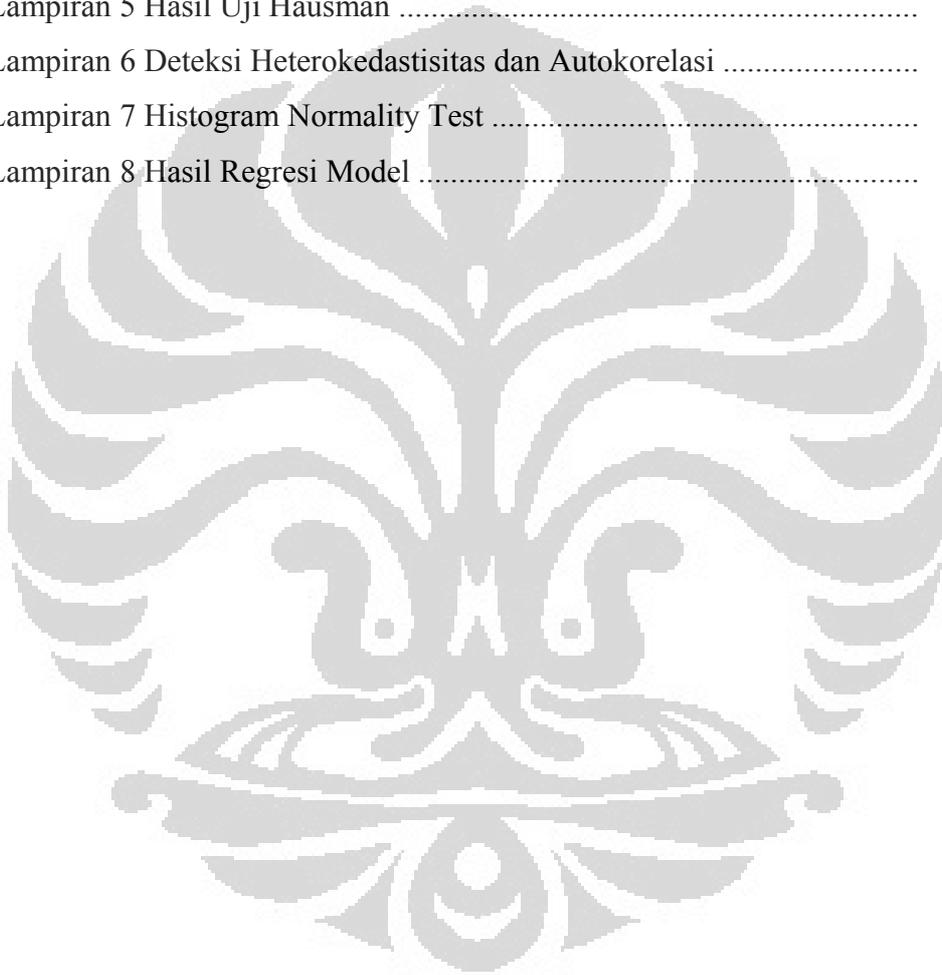
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian	41
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.4 Hasil Regresi Model	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel	61
Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif	62
Lampiran 3 Sebaran Tingkat Pembayaran Pajak	63
Lampiran 4 Hasil Uji Chow	64
Lampiran 5 Hasil Uji Hausman	65
Lampiran 6 Deteksi Heterokedastisitas dan Autokorelasi	66
Lampiran 7 Histogram Normality Test	67
Lampiran 8 Hasil Regresi Model	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Isu *corporate governance* (CG) di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (*Forum for Corporate Government in Indonesia*, 2008). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dwitridinda (2007), mengutip Jamie Allan (Sekretaris Jenderal *The Asian Corporate Governance Association*), menyebutkan bahwa penerapan *corporate governance* di setiap negara dapat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara juga faktor internal perusahaan dalam hal jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur permodalan, manajemen serta sejarah perusahaan. Keberhasilan penerapan CG akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton et al, 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien.

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak. Scholes et al (2002), seperti dikutip oleh Phillips (2003), mendefinisikan perencanaan pajak efektif sebagai perencanaan pajak yang meminimalkan arus kas untuk pembayaran pajak perusahaan, mengharuskan manajer untuk memperkirakan manfaat dari keputusan mereka terhadap pembayaran pajak tersebut. Graham (2003) telah meneliti pengaruh pajak terhadap pilihan kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa cara pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, yaitu dalam hal kebijakan struktur modal, bentuk dan restrukturisasi organisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi, dan manajemen risiko.

Literatur mengenai pengaruh CG terhadap manajemen pajak telah banyak ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Penerapan CG diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami

oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Untuk menjembatani konflik akibat masalah agensi tersebut dapat dikurangi, salah satunya dengan cara pemberian kompensasi yang tepat bagi para manajer. Selain hal itu, penerapan CG yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada di tangan manajemen selaku pengelola operasional perusahaan. Dengan adanya kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karenanya, pemberian kompensasi yang tepat kepada manajemen dapat menjadi sebuah mekanisme penerapan CG yang baik.

Jensen dan Murphy (1990), seperti dikutip oleh Minnick dan Noga (2010), telah membuktikan pengaruh kompensasi terhadap kinerja perusahaan. Pemberian paket kompensasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah *moral hazard* manajemen. Rego dan Wilson (2009) juga menemukan hubungan yang positif antara level kompensasi dan tindakan pajak agresif perusahaan yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh CG terhadap kebijakan tindakan penghindaran pajak yang berpihak kepada pemegang saham perusahaan. Mereka menemukan bahwa paket kompensasi atas manajemen menjadi faktor penentu signifikan atas tindakan penghindaran pajak perusahaan dengan penerapan CG yang lemah. Lebih spesifik kepada manajemen pajak, Minnick dan Noga (2010) menemukan hubungan negatif antara peningkatan kompensasi dengan pembayaran pajak perusahaan. Pemberian tingkat kompensasi yang tinggi akan mendorong penurunan *effective tax rates* perusahaan. Armstrong et al. (2012) membuktikan hubungan negatif antara kompensasi yang diterima dengan rendahnya pajak perusahaan.

Penelitian ini ingin menganalisa pengaruh paket kompensasi direksi dan kepemilikan direksi, sebagai salah satu komponen CG, terhadap manajemen pajak

yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) dan Armstrong et al. (2012) untuk menemukan bukti bahwa kebijakan kompensasi, baik secara kas maupun saham, sebagai salah satu mekanisme CG internal dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Dalam penelitiannya, Minnick dan Noga (2010) menggunakan komposisi direksi, *entrenchment*, kompensasi dewan, dan kompensasi eksekutif sebagai *proksi* atas mekanisme *corporate governance* perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan atas rentang waktu yang lama untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang mekanisme CG terhadap manajemen pajak perusahaan. Armstrong et al. (2012) menggunakan dua jenis proksi atas kompensasi eksekutif. Proksi pertama berupa total nilai kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun. Proksi kedua adalah *compensation mix*, yaitu rasio dari masing-masing komponen kompensasi eksekutif terhadap total kompensasi yang diterima. Penelitian ini dilakukan atas rentang waktu 5 tahun (2002 – 2006).

Berbeda dengan yang dilakukan Minnick dan Noga (2010), penelitian ini menggunakan proksi penerapan CG yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Mekanisme CG di Indonesia diukur menggunakan proksi skor CG perusahaan, paket kompensasi yang diterima oleh direksi perusahaan, dan persentase kepemilikan saham oleh direksi. Pengukuran paket kompensasi dalam penelitian ini akan menggunakan proksi total nilai kompensasi seperti yang dilakukan oleh Armstrong et al. (2012). Sampel penelitian merupakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dalam kurun periode 2004-2009. Kurun waktu tersebut dipilih untuk mendapatkan sampel yang cukup mengenai manajemen pajak.

Kontribusi penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai mekanisme CG di Indonesia, khususnya mengenai paket kompensasi yang diterima direksi dan kepemilikan saham oleh direksi, yang berhubungan dengan manajemen pajak perusahaan. Sepanjang pengetahuan penulis, masalah ini belum

pernah diteliti di Indonesia. Penerapan mekanisme CG yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia diharapkan mampu menggambarkan pengaruh tersebut dan efisiensi pengelolaan pajak di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan:

- a. Apakah tingkat kompensasi yang diberikan kepada direksi dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan?
- b. Apakah kepemilikan saham oleh direksi perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan?
- c. Apakah penerapan *corporate governance* dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti mengenai:

- a. Pemberian tingkat kompensasi kepada direksi perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan.
- b. Kepemilikan saham oleh direksi dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan.
- c. Penerapan *corporate governance* dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

1.4. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai penerapan CG dan perpajakan di Indonesia dalam hal pengaruh tingkat kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi sebagai salah satu mekanisme CG terhadap kebijakan manajemen pajak perusahaan.

Bagi pemerintah, sebagai regulator pajak, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal membuat kebijakan pajak yang lebih baik karena secara

tidak langsung akan mempengaruhi penerapan CG yang baik pada perusahaan di Indonesia. Selain hal tersebut, sebagai pembuat kebijakan CG, pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan lanjut dalam membuat kebijakan penerapan CG yang lebih baik lagi. Sehingga penerapan CG dapat mengatasi masalah agensi yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Sedangkan bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh kebijakan paket kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi sebagai salah satu mekanisme CG terhadap pengelolaan pajak perusahaan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dipaparkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kontribusi penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan atas tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan literatur yang membahas mengenai CG, manajemen pajak, serta pengaruh penerapan CG terhadap manajemen pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan konsep pemikiran, model penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, pemilihan sampel dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dijelaskan pula metode statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan cara pemilihan sampel, hasil pengolahan data, pemilihan metode estimasi hipotesis, interpretasi hasil uji statistik dan pembuktian hipotesis serta pengaruhnya terhadap tujuan penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi pemaparan hasil penelitian, penarikan simpulan yang diperoleh dari penelitian, saran bagi pengguna hasil penelitian serta pemaparan keterbatasan atas penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang mendasari praktik perusahaan selama ini. Teori ini menjelaskan hubungan antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan (pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/manajemen) dalam bentuk kontrak kerja sama. Dalam kerja sama tersebut pihak pemilik mendelegasikan kepada pihak agen untuk mengelola sumber daya secara efisien untuk mendapatkan keuntungan paling maksimal. Oleh karenanya, teori ini berfokus pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan pemilik dan agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan pada dasarnya mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan pribadi. Pemilik hanya tertarik dengan hasil investasi mereka dalam perusahaan. Sedangkan agen diberikan kompensasi yang cukup tinggi atas imbalan jasa profesional mereka. Karena perbedaan kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan pribadi. Para pemilik menginginkan pengembalian yang besar dan cepat atas investasi yang mereka lakukan. Salah satunya dicerminkan dengan kenaikan dividen atas saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerja yang telah dicapai. Seringkali pemilik menilai kinerja agen berdasarkan atas laba yang dihasilkan perusahaan sehingga alokasi untuk dividen pun akan semakin besar. Dalam hal ini, agen dianggap telah berkinerja baik dan layak mendapatkan insentif yang tinggi.

Menurut Alijoyo dan Zaini (2004), *agency conflict* dapat terjadi pada beberapa hal sebagai berikut:

1) *Moral Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan sehingga manajer akan berada pada posisi untuk mengeskrak tingkat remunerasi yang lebih

tinggi dari perusahaan.

2) *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif (*internal positive investment opportunities*).

3) *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk dirinya sendiri dalam mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer.

4) *Time Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV positif yang jauh lebih besar.

Perbedaan kepentingan ekonomis ini akan semakin tajam dengan adanya perbedaan informasi yang diterima oleh pihak pemilik dibandingkan dengan pihak agen. Asimetris informasi ini terjadi karena adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. Pemilik mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan menguntungkan pemilik (*moral hazard*). *Moral hazard* ini dapat terjadi karena pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan para pemilik. Pihak agen dapat memanfaatkan kondisi ini untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan pihak pemilik. Pada akhirnya, konflik kepentingan ini akan bermuara pada masalah yang dikenal dengan *agency problem*. Dalam kondisi seperti ini *agency problem* merupakan konflik antara pemilik dan agen.

Untuk sebagian besar negara Asia, termasuk Indonesia yang memiliki

struktur kepemilikan keluarga yang sangat besar, Claessens et al. (1999) membuktikan bahwa *agency problem* bergeser dari konflik antar pemilik dan agen menjadi konflik pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam kondisi struktur saham yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas, agen bukanlah menjadi masalah utama karena umumnya pemegang saham mayoritas akan menempatkan anggota keluarga sendiri dalam pengurusan pengelolaan perusahaan.

2.2. Manajemen Pajak

2.2.1. Pengertian

Minnick dan Noga (2010) mengartikan manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum.

Suandy, seperti dikutip oleh Christian (2008), mengatakan bahwa manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Hipotesis biaya politik berpendapat bahwa perusahaan mungkin menolak untuk mengelola pajaknya jika mereka dianggap tidak patriotik atau sebagai perusahaan yang buruk. Ada beberapa contoh dimana biaya politik memaksa perusahaan untuk mengubah pilihan mereka, termasuk tidak memperkecil pajak sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimanapun juga, setiap perusahaan perlu untuk mengelola dan merencanakan pajak yang sesuai. Strategi manajemen pajak yang dipilih perusahaan sangat bergantung pada struktur *governance* dan kompensasi yang ada (Minnick dan Noga, 2010).

Dalam suatu manajemen pajak yang strategis, ketika sebuah perusahaan

memilih transaksi, maka keputusan pemilihan tersebut akan selalu mengarah kepada manajemen pajak. Karayan et al (2002) menjelaskan lebih lanjut dalam kerangka SAVANT (*Strategic, Anticipation, Value Added, Negotiating, and Transforming*):

1. Strategis (*Strategic*)

Perusahaan akan memilih melakukan transaksi yang dapat meningkatkan nilai di akhir periode. Jika transaksi tersebut (termasuk pengaruh pajak) konsisten dengan tujuan strategis perusahaan, maka perusahaan akan melanjutkan transaksi tersebut.

2. Antisipasi (*Anticipation*)

Perusahaan mengantisipasi pajak masa depannya dan memilih waktu yang tepat, tahun berjalan atau berikutnya, untuk melaksanakan suatu transaksi. Jika ada keuntungan pajak dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan transaksi, maka perusahaan memilih kebijakan sehingga transaksi ekonomi nonpajak masih berguna.

3. Negosiasi (*Negotiating*)

Pajak juga dapat dinegosiasikan antara perusahaan dengan entitas lainnya. Perusahaan berusaha memindahkan lebih banyak tanggung jawab pajak ke pihak yang lain dengan menegosiasikan kesepakatan dari transaksi yang dilakukan perusahaan.

4. Transformasi (*Transforming*)

Perusahaan mencoba mengurangi beban pajak dengan mentransformasikan transaksi yang dipertimbangkan menjadi lebih sesuai dengan perlakuan pajak yang diinginkan perusahaan.

5. Nilai Tambah (*Value Added*)

Nilai tambah biasanya berpengaruh terhadap perusahaan sepanjang waktu seperti pajak. Karena hal itu merupakan prinsip dasar bahwa arus kas masuk lebih bernilai sekarang daripada nanti, manajemen pajak juga memperhitungkan *time value* dari transaksi.

2.2.2. Tujuan Manajemen Pajak

Banyak anggapan bahwa meminimalisasi pajak adalah tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*). Pandangan ini sangat sempit karena pajak merupakan salah satu faktor, meskipun merupakan faktor utama, dalam serangkaian biaya dan faktor lainnya yang menghasilkan jumlah yang sering dikenai pajak, yaitu keuntungan dan kekayaan. Contoh sederhana, perusahaan dapat menghindari pajak dengan tidak menghasilkan pendapatan atau memiliki properti, tetapi pada umumnya tidak ada yang ingin mengalami kerugian. Strategi yang dilakukan untuk mereduksi pajak hampir tidak ada yang bebas biaya. Jika tidak ada hal yang lain, ketika berfokus pada penghematan pajak, manajer tidak berfokus pada peningkatan penjualan, peningkatan kualitas produk, atau memproduksi barang atau pun jasa secara efisien. Tujuan akhir adalah untuk menyeimbangkan manfaat terhadap risiko dan biayanya.

Oleh karenanya, meskipun pengurangan pajak secara menyeluruh bukan menjadi tujuan, perusahaan sering menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam jumlah yang besar dalam mewujudkan strategi pengurangan pajak. Tujuan terpenting yaitu mengurangi pajak tanpa mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan. Menurut Karayan dan Swenson (2007) strategi penghematan pajak pada umumnya termasuk dalam empat kategori berikut, yaitu penciptaan (*creation*), perubahan (*conversion*), waktu (*timing*), dan pemisahan (*splitting*). *Creation* melibatkan perencanaan dalam memanfaatkan subsidi pajak, seperti memindahkan operasi dalam wilayah hukum yang mengenakan pajak lebih rendah.

Conversion melibatkan perubahan operasi sehingga pendapatan atau aset yang kategori pajaknya lebih rendah dapat diperoleh. Sebagai contoh, penjualan persediaan yang dipromosikan dengan iklan akan menghasilkan pendapatan yang besar sehingga sewajarnya akan terkena tarif pajak yang tinggi pula. Namun, sebuah iklan yang sukses membentuk *image* akan menghasilkan peningkatan terhadap *goodwill* perusahaan, yang tidak dikenakan pajak sampai *goodwill* tersebut terjual bersamaan dengan akuisisi perusahaan. Pengenaan pajaknya pun bukan berdasarkan besarnya pendapatan perusahaan.

Timing melibatkan teknik-teknik yang memindahkan jumlah yang dikenai pajak (dasar pengenaan pajak) kepada periode akuntansi dengan pajak lebih rendah. Sebagai contoh adalah *accelerated depreciation*, yang mengizinkan lebih dari satu biaya aset menjadi beban yang dapat mengurangi pajak tahun berjalan sehingga menangguhkan pembayaran pajak. Teknik *Splitting* membagi dasar pengenaan pajak berdasarkan dua atau lebih pembayar pajak untuk memanfaatkan keuntungan perbedaan tarif pajak.

2.2.3. Pengukuran Manajemen Pajak

Manajemen pajak dapat diukur melalui beberapa cara. Cara yang paling umum dipakai adalah menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rates – ETR*). Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) pengukuran ETR mencerminkan efektivitas perencanaan pajak perusahaan (Sari, 2010). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya (Dyrenge et al, 2008; Minnick dan Noga, 2010; Sari, 2010), perhitungan tingkat pajak efektif dapat dibagi dalam dua jenis perhitungan, yaitu melalui GAAP ETR (GETR) dan *cash ETR* (CETR).

Secara umum, nilai GETR didapatkan dengan membagi total beban pajak penghasilan (*tax expense*) dengan laba sebelum pajak (*pretax income*). Pengukuran GETR untuk melihat perbandingan tetap antara laba akuntansi dan laba fiskal (Sari, 2010). Beban pajak penghasilan merupakan jumlah antara *current tax expense* dan *deferred tax expense*. *Deferred tax* merupakan pajak yang akan dibayar atau diterima kembali sebagai hasil dari perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini adalah alat pengukuran perencanaan pajak yang paling efektif dan populer untuk mengurangi *current tax* dan memaksimalkan *time value of money*. Sedangkan CETR didapatkan dengan membagi total pajak yang dibayar perusahaan (*cash taxes paid*) dengan laba sebelum pajak. Pengukuran CETR digunakan mengidentifikasi efisiensi pajak yang dibayarkan secara kas.

2.2.4. Pengaruh Masalah Agensi (*Agency Problems*) Terhadap Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa

pengelolaan pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak prinsipal dan para manajer selaku agen. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga. Sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal.

Untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut pihak prinsipal dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajemen (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang tepat kepada manajer. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui pengelolaan pajak yang baik.

Beberapa penelitian telah membuktikan hubungan antara manajemen pajak dan tingkat kompensasi yang diberikan kepada manajemen. Rego dan Wilson (2009) menemukan hubungan positif antara kompensasi dengan pelaporan pajak agresif. Semakin besar jumlah kompensasi yang diterima CEO dan CFO perusahaan maka semakin agresif pula tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitiannya mengenai hubungan antara tingkat pajak efektif perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO dan manajer, Phillips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer. Mereka menemukan bukti yang beda bahwa peningkatan kompensasi untuk manajer cenderung mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax Sheltering* merupakan upaya mengurangi tingkat pendapatan kena pajak sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak. Sejalan dengan yang lain, Armstrong et al. (2012) serta Minnick dan Noga (2010) juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Karena manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang,

maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal pengelolaan pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif.

2.3. *Corporate Governance* (CG)

2.3.1. Pengertian

Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan tentang CG. Monks dan Minow (2004) menjelaskan bahwa CG merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya.

The Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mengartikan CG sebagai:

“CG is the system by which business corporation are directed and controlled. The CG structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it is also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Cadbury Committee, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan CG atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG), dalam situsnya, mendefinisikan CG sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan *good CG*

(GCG) diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dalam lampiran surat Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor S-106/M-PM.PBUMN/2000 tentang Kebijakan Penerapan *Corporate Governance* terdapat pengertian CG sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, dan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Dari beberapa definisi atas CG sebelumnya dapat disimpulkan bahwa CG adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan CG yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda, 2007).

2.3.2. Prinsip *Corporate Governance*

The Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) sejak tahun 1999 telah menghasilkan prinsip yang berkaitan dengan CG sehingga menjadi standar dan pedoman bagi penerapan CG di sektor swasta. Prinsip ini telah menjadi pengukuran internasional untuk pembuat kebijakan, investor, perusahaan, dan *stakeholders* lainnya di seluruh dunia.

Prinsip CG OECD telah melalui revisi pada tahun 2004 karena mengikuti perkembangan dalam ekonomi dan untuk memberikan pedoman penerapan CG yang lebih komprehensif. Prinsip CG OECD yang telah direvisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat dasar kerangka CG yang efektif (*Ensuring the basis for an effective CG framework*)
Kerangka CG harus mendorong pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan aturan-aturan perundangan dan dengan menyebutkan dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara otoritas pengawasan, otoritas pengaturan dan otoritas penegakan.
2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan (*The rights of shareholders and key ownership function*)
Pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. Kerangka CG harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham
3. Perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*)
Kerangka CG harus memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
4. Peranan pemangku kepentingan dalam CG (*The role of stakeholders in CG*)
Kerangka CG harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang dibuat berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, pekerjaan, dan keberlanjutan usaha yang sehat dari segi keuangan.
5. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and transparency*)
Kerangka CG harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat untuk semua hal yang berkaitan dengan situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan CG.
6. Tanggung jawab dewan pengurus (*The responsibilities of the boards*)
Kerangka CG harus memastikan adanya panduan strategis bagi perusahaan, pengawasan manajemen yang efektif oleh dewan dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Walaupun prinsip *corporarate governance* OECD menjadi banyak acuan bagi penerapan CG di banyak negara, hal tersebut tidak menjadikan prinsip CG tersebut dapat diadopsi secara utuh oleh negara lainnya. Reformasi di Asia berbeda dengan yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara. Perbedaan dalam struktur kepemilikan, praktik bisnis, dan kemampuan penegakan hukum menyebabkan tindakan adopsi prinsip CG OECD adalah hal yang salah. Oleh karena itu, pemerintah di Asia harus menyesuaikan prinsip *corporate governance* OECD sesuai yang dibutuhkan negara sehingga dapat menjadi dasar penegakan yang ketat (Barton et al, 2004).

Indonesia, melalui Komite Nasional Kebijakan *governance* (KNKG), telah membuat suatu prinsip GCG yang telah disesuaikan dengan faktor internal, eksternal, dan kondisi unik yang terdapat di Indonesia. Asas GCG Indonesia dalam Pedoman GCG 2006 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibilities)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.3.3. Tujuan dan Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

2.3.3.1. Tujuan *Corporate Governance*

Penerapan CG ditujukan untuk mencapai beberapa hal. Sheridan dan Kendall (1992), seperti dikutip oleh Sheikh dan Rees (1995), mengemukakan bahwa *good CG* terdiri dari sistem atas struktural, operasional, dan pengawasan suatu perusahaan agar mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan strategik jangka panjang pemilik yang mana, setelah mampu bertahan, mungkin terdiri membangun nilai pemegang saham atau mendirikan pangsa pasar yang dominan atau menjaga kepemimpinan teknis pada hal tertentu atau hal lainnya, tetapi tentunya akan tidak sama untuk semua organisasi;
2. Untuk mempertimbangkan dan memperdulikan kepentingan pegawai: masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang terdiri atas semua siklus perusahaan termasuk perencanaan kebutuhan masa depan, rekrutmen, pelatihan, lingkungan pekerjaan, prosedur pemberhentian pegawai, sampai perhatian kepada pensiunan;
3. Untuk memperhatikan kebutuhan lingkungan dan komunitas lokal, dalam artian dampak fisik akibat operasional perusahaan terhadap lingkungan sekitar

dan hubungan ekonomi dan budaya dengan penduduk lokal;

4. Untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok dalam hal kualitas jasa yang disediakan, pemesanan yang memuaskan dan prosedur penanganan tagihan;
5. Untuk menjaga kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku di mana perusahaan menjalankan aktivitasnya.

Menurut Sheikh dan Rees (1995) tujuan penerapan CG itu hanya terdiri dari dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengontrol biaya agensi (*agency cost*). Sebuah struktur tata kelola yang baik adalah salah satunya yang dapat meminimalisasi *agency cost*. *Agency cost* merupakan kerugian yang diderita pemegang saham sebagai akibat perilaku manajemen yang menyimpang dari memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi perilaku tersebut.

Tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial. Kebijakan maksimalisasi keuntungan tidak selalu memaksimalkan kekayaan, dan bahkan maksimalisasi kekayaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Kepentingan perusahaan dan sosial dapat disejajarkan melalui berbagai regulasi teknik. Perusahaan dapat, misalnya dipaksa untuk membatasi emisi bahaya melalui larangan, lisensi, atau perpajakan.

2.3.3.2. Manfaat *Corporate Governance*

CG menekankan pentingnya kesejahteraan pemegang saham juga termasuk hubungan antara tujuan strategis perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Hubungan ini membantu menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan dalam waktu yang lama. Lebih lanjut, manfaat penerapan CG dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen

CG yang baik memperbolehkan pihak luar untuk menilai sebaik apa perusahaan dikelola. Inti dari CG adalah transparansi dan prinsip pengungkapannya. Keuntungan dari CG adalah manfaatnya dapat diukur. *Good CG* menjamin penilaian pasar yang lebih tinggi. Inisiatif CG harus

menjamin bahwa dewan pengawas dan manajemen mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan terbaik atas bisnis perusahaan.

2. Transparansi

CG mendorong transparansi yang lebih atas bisnis, sehingga mencapai kepercayaan dari para *stakeholders*. Transparansi ini menjadi prioritas utama dengan meningkatkan akses terhadap modal dan pasar keuangan. Meningkatkan modal juga menjadi lebih mudah karena dukungan yang diperoleh perusahaan dari para *stakeholders*. Diversifikasi aset melalui merger dan akuisisi lebih mudah dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan GCG. Praktik CG mendorong sistem pengawasan internal, yang akhirnya menghasilkan marjin laba yang lebih baik. Oleh karena itu, bagi perusahaan, inisiatif CG menjadikan perusahaan lebih atraktif bagi investor. Nilai perusahaan meningkat dengan mengadopsi praktik GCG. Jika dua perusahaan memiliki laporan keuangan perbandingan, investor institusional lebih suka berinvestasi kepada salah satu perusahaan yang telah membuktikan dirinya sebagai perusahaan dengan pengelolaan yang baik.

3. Manfaat kepada pemegang saham

Inisiatif GCG dapat membantu dewan pengawas dan manajemen untuk bertindak berdasarkan tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham juga memiliki keamanan yang lebih atas investasi yang mereka lakukan karena adanya transparansi dan akses kepada detail investasi. Pemegang saham menjadi lebih tahu atas semua keputusan penting manajemen, seperti penjualan aset dan perubahan klausul.

4. Manfaat atas ekonomi nasional

Jika sebuah negara memiliki reputasi atas praktik pengelolaan *governance* yang bagus, hal ini akan menambah kepercayaan diri investor, yang akhirnya mengarah kepada aliran arus modal yang bagus. Standar akuntansi dan pelaporan yang diadopsi oleh negara juga faktor penting dalam menciptakan investasi. Oleh karenanya, praktik *good* CG dapat bermanfaat untuk ekonomi negara.

2.3.4. Pengukuran *Corporate Governance*

Kebutuhan akan pemeringkatan penerapan CG semakin tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa adanya suatu anggapan global bahwa penerapan *good* CG dapat mengurangi permasalahan perusahaan dan membangun reputasi yang baik. Tetapi belum adanya kesepakatan atas bagaimana mekanisme ini dapat memberikan nilai tambah, mengukur nilai tersebut, dan bagaimana membuat suatu *benchmark* atas mekanisme ini.

Mekanisme CG merupakan suatu hal yang sulit untuk diartikan tetapi sangat mudah untuk dikenali. Hal ini jelas menggarisbawahi meningkatnya kepentingan CG dalam hal pengambilan keputusan investasi, tetapi disayangkan karena tingginya metodologi dan usulan membuat tidak ada suatu kesepakatan universal dalam mengukur CG.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, CG dapat diukur melalui mekanisme CG perusahaan maupun dengan Indeks CG yang merupakan hasil dari penelitian. Rahadian, seperti dikutip oleh Sari (2010), berpendapat penggunaan indeks CG dapat mencerminkan kondisi penerapan CG suatu perusahaan secara komprehensif.

Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menggunakan indeks Gompers et al. (2003) yang menggunakan 24 ukuran nilai untuk mengklasifikasikan proteksi terhadap pemegang saham. Menurut klasifikasi tersebut sebuah perusahaan dengan indeks di bawah 6 dikategorikan sebagai perusahaan dengan *shareholder power* yang kuat. Sedangkan indeks di atas 13 dikategorikan sebagai perusahaan dengan *managerial power* yang kuat. Minnick dan Noga (2010) juga menggunakan indeks tersebut dan ditambah dengan *Entrenchment Index* oleh Bebchuk et al. (2009) yang terdiri atas 6 ukuran nilai *governance*. Indeks Gompers et al. (2003) dan indeks Bebchuk et al. (2009) disusun dalam kondisi *governance* yang terjadi di Amerika. Sehingga tidak dapat diaplikasikan secara langsung dalam kasus di Indonesia. Karena untuk setiap negara penerapan *corporate governance* dapat berbeda kriteria satu dengan lainnya.

Terdapat 3 macam indeks CG di Indonesia, yaitu *Corporate Governance*

Scorecard (CGS) oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), dan indeks CG Arsjah (2005). Mengikuti Sari (2010), penelitian ini menggunakan *CG Scorecard* oleh IICD. Kriteria CGS terdiri atas 4 kriteria performa CG pada satu perusahaan, yaitu *Excellent* (rentang 90-100%), *Good* (rentang 80-89%), *Fair* (rentang 60-79%), dan *Poor* (kurang dari 60%).

Kriteria *Excellent* diperoleh jika perusahaan telah mematuhi semua standar yang ditetapkan oleh OECD yang dikembangkan dalam penetapan CG Scorecard. Kriteria *Good* didapat jika perusahaan telah menerapkan lebih dari persyaratan legal minimum, namun kurang standar GCG internasional dan perusahaan menunjukkan kemauan yang positif untuk mewujudkannya. Kriteria *Fair* diberikan apabila perusahaan telah menerapkan persyaratan legal minimum saja. Sedangkan kriteria *Poor* diberikan kepada perusahaan tidak memenuhi persyaratan minimum dan tidak menunjukkan kemauan yang cukup dalam penerapan GCG.

2.3.5. Hubungan *Corporate Governance* dan *Agency Problems* Serta Kaitannya Dengan Manajemen Pajak

Isu sentral dari CG adalah berdasarkan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. Teori Agensi menjelaskan secara komprehensif mengenai konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal, yang biasa disebut sebagai masalah agensi. Seringkali untuk menjembatani konflik tersebut dibutuhkan biaya (*agency cost*). Seperti yang telah dijelaskan dalam poin 2.3.3.1 bahwa dengan adanya CG, *agency cost* dapat dikurangi. Pengurangan ini akan lebih mengefektifkan kinerja perusahaan sehingga mampu memaksimalkan marjin laba. Peningkatan kinerja perusahaan juga akan tercermin dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan CG untuk memaksimalkan nilai pemegang saham perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme CG memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak.

Hubungan negatif terhadap pembayaran pajak ditunjukkan oleh jumlah direksi, usia CEO, direksi independen, dan dualisme CEO sebagai ketua dewan. Tetapi hubungan positif ditunjukkan oleh kekuasaan manajerial terhadap pembayaran pajak.

Desai dan Dharmapala (2006) telah membuktikan bahwa kebijakan tindakan pengelolaan pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan CG. Kualitas CG yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sejalan dengan Desai dan Dharmapala (2006), Sari (2010) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan atas penerapan CG terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

Literatur sebelumnya membuktikan adanya hubungan antara penerapan CG dan pengelolaan pajak. Walaupun sampai sekarang belum ada hasil yang konsisten mengenai hubungan penerapan CG dengan manajemen pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian terhadap masalah ini masih terbuka luas untuk menemukan pengaruh yang tepat dari penerapan CG terhadap manajemen pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Paket Kompensasi Direksi terhadap Manajemen Pajak

Salah satu tujuan penerapan CG adalah untuk mengatasi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Konflik ini muncul karena adanya asimetri informasi yang diterima oleh pemilik atas informasi yang dimiliki manajemen mengenai perusahaan. Dengan dipicu adanya kepentingan ekonomi, konflik ini dapat memicu tindakan oportunistik manajemen (*moral hazard*). Manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen. Sebagai hasil peningkatan kinerja manajemen tersebut dengan

sendirinya kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Kinerja perusahaan selama ini, pada umumnya, masih diukur melalui *bottom-line performance* (kinerja laba). Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin efisien pengelolaan pajak perusahaan maka diharapkan akan semakin tinggi marjin laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak akan meningkat.

Selain itu, kompensasi ini, secara tidak langsung, juga dapat diperoleh melalui kepemilikan saham direksi. Kepemilikan saham oleh direksi dapat diperoleh dengan cara membeli sendiri atau melalui program khusus perolehan saham yang dilakukan perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajemen mempunyai motivasi untuk meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya, melalui manajemen pajak yang efisien. Hal ini dapat mendorong manajemen memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak perusahaan

H₂ : Kepemilikan saham oleh direksi berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak perusahaan

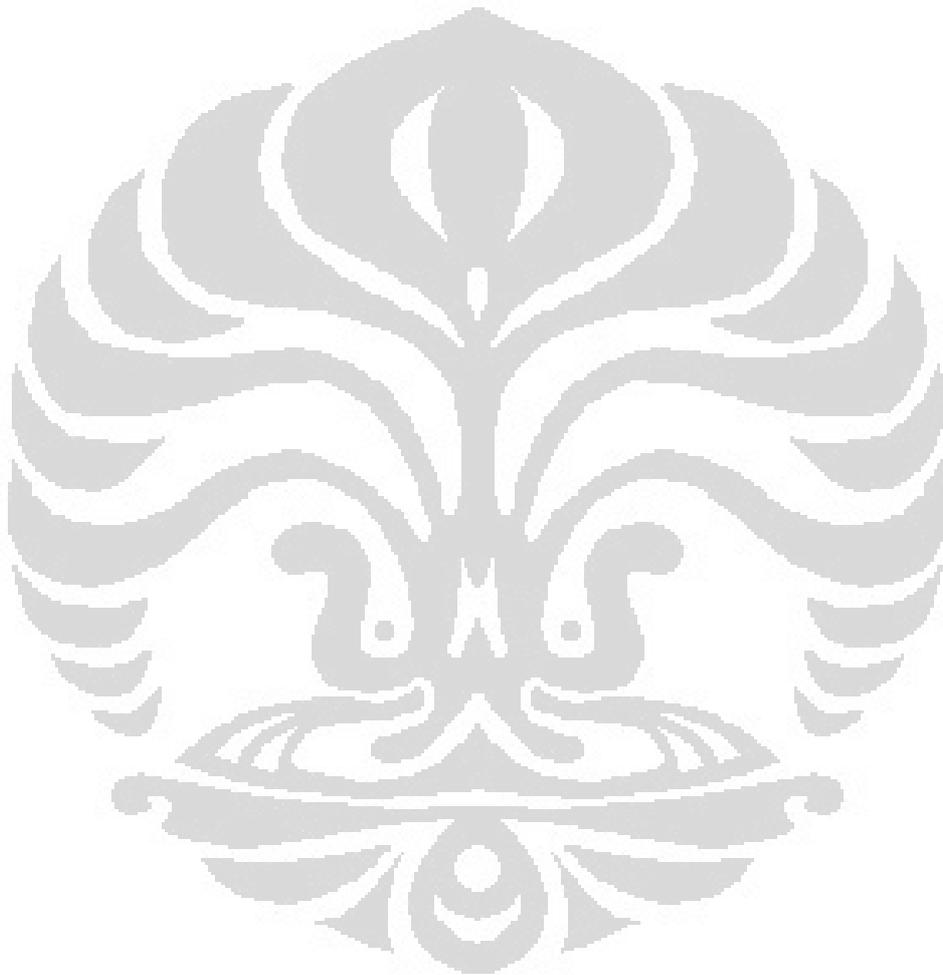
2.4.2. Pengaruh Penerapan CG terhadap Manajemen Pajak

Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan CG dapat mendorong manajemen mengelola perusahaan lebih efisien dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk kepentingan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengawasan internal yang lebih baik sehingga seluruh pengelolaan perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan yang profesional (efektif dan efisien) menjadi sebuah unsur untuk menghasilkan marjin laba yang lebih baik pula. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu hal yang mempengaruhi marjin laba adalah pengelolaan

pajak yang efisien karena terkait biaya yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan *bottom-line performance*. Oleh karenanya, penerapan CG akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efisien.

Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ : CG perusahaan berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak

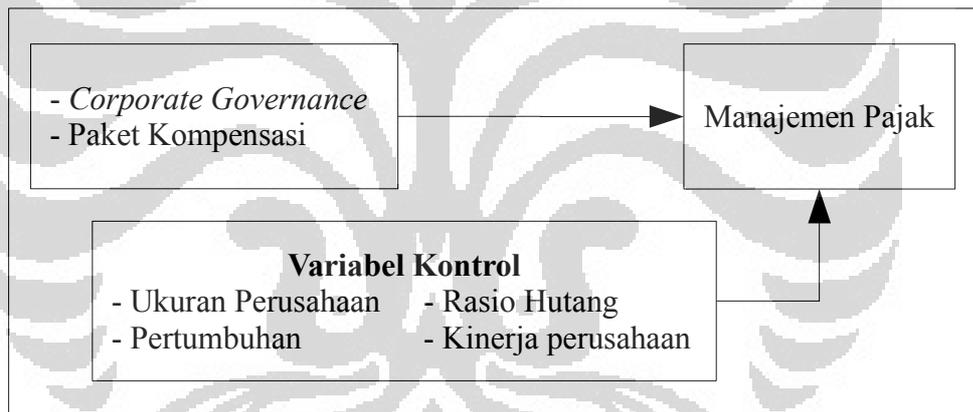


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menguji tentang pengaruh penerapan mekanisme CG terhadap efisiensi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga, secara spesifik, ingin mengungkapkan sejauh mana kompensasi kepada direksi dan kepemilikan saham oleh direksi berpengaruh terhadap kebijakan efisiensi pajak perusahaan. Gambar 3.1 menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini.

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



Penelitian berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya karena: (1) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia; (2) menggunakan pengukuran kepemilikan saham direksi sebagai komponen mekanisme CG dan (3) pengukuran mekanisme CG yang menggunakan skor CG. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, pertumbuhan, rasio hutang, dan kinerja perusahaan. Tujuan penggunaan variabel kontrol ini adalah untuk mengontrol karakteristik perusahaan atau motivasi perusahaan dalam pengelolaan manajemen pajak.

3.2. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian sebagai berikut:

$$CETR = \alpha_1 + \alpha_2 KOMPDIR_{it} + \alpha_3 SAHAMDIR_{it} + \alpha_4 CG_{it} + \alpha_5 FIRMSIZE_{it} + \alpha_6 MBRATIO_{it} + \alpha_7 DEBRATIO_{it} + \alpha_8 ROA_{it} + \varepsilon$$

dimana,

CETR	= Tingkat Pajak Efektif (ETR) perusahaan yang dihitung berdasarkan <i>cash</i> ETR
KOMPDIR	= Logaritma natural dari total kompensasi Direksi yang diberikan selama setahun
SAHAMDIR	= Persentase kepemilikan saham yang dimiliki direksi
CG	= Skor CG perusahaan yang bersumber dari IICD
FIRMSIZE	= Ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural total aset
MBRATIO	= Ukuran pertumbuhan perusahaan, diukur dengan <i>market-to-book ratio</i>
DEBRATIO	= Rasio hutang, diukur dengan <i>debt-to-equity ratio</i>
ROA	= Kinerja perusahaan, diukur dengan <i>return on asset ratio</i>
α	= konstanta regresi
ε	= error

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen (Tingkat Pajak Efektif)

Berdasarkan Dyreng et al. (2008), untuk menjelaskan tingkat pajak efektif (*Effective Tax Rate* – ETR) perlu dilakukan perhitungan atas ETR berdasarkan GAAP dan *cash* ETR. Mengikuti Sari (2010), yang merujuk pada Chen et al. (2010), penelitian akan menggunakan nilai ETR dalam rentang 0 – 1. Sehingga perusahaan yang memiliki nilai ETR di luar rentang tersebut tidak diperhitungkan dalam analisis. Hal ini untuk menghindari adanya distorsi pada ETR dan masalah dalam model yang digunakan.

Dalam akuntansi pajak penghasilan, beban pajak dihitung berdasarkan jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang sebagai hasil dari *book-tax differences*. Perbedaan tersebut merupakan perencanaan pajak yang paling efektif dan populer dalam mengurangi pajak dan memaksimalkan *time value of money*. Oleh karenanya, GAAP ETR yang memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan tidak merefleksikan manajemen pajak jangka pendek yang dibayarkan dengan kas (Minnick dan Noga, 2010). Untuk mengatasi masalah tersebut, Dyreng et al. (2008) mengukur pajak efektif menggunakan pembayaran pajak secara kas sebagai proksi atas manajemen pajak. Karena dengan alasan tersebut, penelitian ini menggunakan proksi *cash ETR* sebagai proksi manajemen pajak. *Cash ETR* merupakan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pretax income*). Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam Laporan Arus Kas pada pos 'pembayaran pajak penghasilan' di ' arus kas dari aktivitas operasi'. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos 'laba sebelum pajak penghasilan'. Perhitungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$CETR_{it} = \frac{CashTaxesPaid_{it}}{PretaxIncome_{it}}$$

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Kompensasi

Minnick dan Noga (2010) menggunakan perhitungan *equity incentives* atau *pay performance sensitivity* (PPS). PPS mengukur perubahan kekayaan eksekutif (dalam nilai uang) dari kepemilikan saham dan opsi memiliki saham mereka terhadap 1% perubahan dalam harga saham. Rego dan Wilson (2009) dan Gregg et al. (2010) menggunakan jumlah kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif perusahaan sebagai *proksi* atas kompensasi ini. Armstrong et al. (2012) menggunakan nilai total kompensasi yang diterima selama setahun oleh eksekutif perusahaan dan *compensation mix* yang berupa rasio dari tiap-tiap komponen kompensasi tersebut terhadap nilai total kompensasi yang diterima. Dalam

penelitian ini, mengikuti Armstrong et al. (2012), hanya menguji tingkat kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi. Penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima direksi selama satu tahun. Data kompensasi direksi terdapat dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan.

3.3.2.2. Kepemilikan Saham Direksi

Minnick dan Noga (2010) telah membuktikan adanya pengaruh yang signifikan atas kompensasi berbasis saham dengan manajemen pajak perusahaan. Dalam penelitiannya mereka menemukan bukti bahwa peningkatan kompensasi berbasis saham yang diberikan kepada CEO berpengaruh positif terhadap pengelolaan pajak. Pengukuran kepemilikan saham dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun.

Data saham yang dimiliki oleh direksi wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan oleh semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan data yang memiliki korelasi dengan kompensasi direksi, penelitian ini hanya menggunakan data kepemilikan saham direksi karena, secara tidak langsung, sebagian kompensasi dapat diterima melalui kepemilikan saham direksi.

3.3.2.3. Penerapan *Corporate Governance*

Penelitian ini menggunakan *Corporate Governance Scorecard* (CGS) yang dikeluarkan oleh IICD sebagai pengukuran penerapan CG pada perusahaan. Penilaian dalam CGS dikembangkan atas lima dari enam prinsip dasar *corporate governance* dari *Organization for Economic Development and Cooperation*. Lima prinsip tersebut adalah *The rights of shareholders and key ownership function*, *The equitable treatment of shareholders*, *The role of stakeholders in CG*, *Disclosure and transparency*, dan *The responsibilities of the boards*.

Pengukuran ini dilakukan oleh IICD dengan mengajukan 119 pertanyaan atas penerapan prinsip dasar tersebut. Prinsip pertama diukur dengan 23 pertanyaan, prinsip kedua diukur dengan 13 pertanyaan, prinsip ketiga diukur

dengan 8 pertanyaan, prinsip keempat diukur dengan 33 pertanyaan, dan prinsip yang kelima diukur dengan 42 pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, IICD menggunakan data dan informasi perusahaan yang tersedia pada laman perusahaan, BEI, hasil RUPS, dan sumber lain yang dipublikasikan.

Skor CG observasi untuk tahun 2004 dan 2005 diambil dari CGS tahun 2005. Skor CG observasi tahun 2006 dan 2007 diambil dari CGS tahun 2007. Sedangkan untuk observasi tahun 2008 dan 2009, skor CG akan diambil dari CGS tahun 2009. Penggunaan skor CG seperti ini dikarenakan asumsi skor CG dalam tahun laporan CGS tidak berbeda signifikan dengan tahun sebelumnya.

3.3.3. Variabel Kontrol

Penelitian Minnick dan Noga (2010) menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Hal ini untuk memastikan bahwa pengaruh CG terhadap manajemen pajak perusahaan dikontrol atas karakteristik spesifik perusahaan. Karakteristik perusahaan tersebut adalah atas ukuran perusahaan, pertumbuhan, rasio hutang, dan kinerja.

a) Ukuran Perusahaan (*FirmSize*)

Ukuran perusahaan ditandai dengan total aset perusahaan. Dyreng et al. (2008) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan akan berbanding terbalik dengan pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Lannis dan Richardson (2011) bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pajak yang agresif membayar pajak yang lebih efisien dan memiliki jumlah aset yang besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memaksimalkan efisiensi pajak (Sari, 2010; Lannis dan Richardson, 2007). Dengan demikian ukuran perusahaan akan berhubungan negatif dengan pembayaran pajak perusahaan. Mengikuti Minnick dan Noga (2010) dan Desai dan Dharmapala (2006) penelitian ini menggunakan natural logaritma dari total aset perusahaan dalam Neraca. Perhitungan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$FirmSize_{i,t} = \ln(TotalAssets_{i,t})$$

b) Pertumbuhan (*Growth*)

Pertumbuhan usaha merupakan hal yang selanjutnya perlu dikontrol. Perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi cenderung tidak terlalu peduli dalam usaha efisiensi pajak dan membayar pajak yang tinggi (Bankman, 1994 dalam Phillips, 2003). Hal ini sejalan dengan Dyreng et al. (2008) yang menyatakan perusahaan yang pertumbuhannya tinggi memiliki tingkat pajak yang tinggi pula. Lebih jauh, Manzon dan Plesko (2002) seperti dikutip oleh Sari (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang pertumbuhannya tinggi lebih suka melakukan investasi pada aset yang memiliki perbedaan waktu pengakuan bebannya antara pelaporan komersil dengan pelaporan fiskal. Sehingga dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan akan berakibat positif dalam pembayaran pajak perusahaan. Untuk mengukur pertumbuhan digunakan pengukuran *Market-to-Book Ratio*, yang merupakan perbandingan antara nilai pasar ekuitas (*stock price*) dengan nilai buku ekuitas perusahaan (*stock book-value*). Oleh karenanya, nilai Nilai pasar ekuitas merupakan nilai pasar saham perusahaan pada tanggal 31 Desember di setiap tahun observasi. Sedangkan nilai buku ekuitas dihitung sebagai perbandingan nilai ekuitas saham atas jumlah saham yang beredar per tanggal 31 Desember setiap tahun observasi. Perhitungan rasio ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$MBRatio_{i,t} = \frac{StockPrice_{i,t}}{StockBookValue_{i,t}}$$

Rasio ini juga dikenal dengan sebutan lain *Price-to-BookValue Ratio* (*PBV Ratio*). Oleh karenanya nilai dari MBRATIO setiap tahun observasi diperoleh dari nilai PBV yang terdapat dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

c) Ratio Hutang (*DebtRatio*)

Dalam kaitan struktur modal, terdapat beberapa pengujian yang membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi mempunyai hutang lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah (Graham, 2003).

Mengikuti Graham (2003), penelitian ini pun mengasumsikan hubungan positif antara hutang dan pembayaran pajak. Rasio hutang diukur dengan cara membagi total liabilitas dengan total ekuitas yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember. Perhitungan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$DebtRatio_{i,t} = \frac{TotalLiabilities_{i,t}}{Equity_{i,t}}$$

d) Kinerja (*Performance*)

Alasan utama perusahaan melakukan manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja. Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan perhitungan ROA (*Return On Assets*). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efisien dalam menghasilkan laba bersih (Dwitridinda, 2007). Perhitungan ROA merupakan perbandingan antara laba bersih yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi dengan total aset dalam Neraca per 31 Desember. Sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$ROA_{i,t} = \frac{NetIncome_{i,t}}{TotalAssets_{i,t}}$$

Penelitian Minnick dan Noga (2010) serta Armstrong et al. (2012) mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi memiliki tingkat pembayaran pajak yang tinggi pula. Dengan demikian, kinerja perusahaan memiliki hubungan positif dengan pembayaran pajak.

3.4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan publik yang termasuk dalam kategori industri manufaktur berdasarkan tahun 2009 dan mengumpulkan data perusahaan tersebut dari tahun 2004 sampai 2009. Pengambilan tahun awal penelitian 2004 menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-49/M.EKON/11/2004 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance yang menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-

Komite Korporasi pada bulan November 2004. Pengambilan sampel 6 tahun dikarenakan rentang waktu tersebut diyakini mampu menjelaskan pengelolaan manajemen pajak dalam perusahaan.

Kriteria pengambilan sampel dari data yang digunakan sebagai berikut:

- a) Perusahaan dengan data yang lengkap dari tahun 2004 sampai 2009
- b) Perusahaan yang mengungkapkan LK dengan mata uang Rupiah
- c) Perusahaan yang memiliki data *Governance Scorecard* dari IICD dari tahun 2004 sampai 2009
- d) Perusahaan yang memiliki nilai *cash ETR* antara 0 dan 1
- e) Perusahaan yang mengungkapkan data kompensasi dewan direksi

3.4.2. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan model data panel. Penggunaan model data panel dapat mengetahui pengaruh heterogenitas dari individu, yaitu pengaruh dari perbedaan karakteristik tiap individu dan pengaruh perbedaan tahun pengamatan terhadap variable yang diamati (Sari, 2010).

Baltagi (1995), dalam Gujarati (2004), mengemukakan beberapa keunggulan penggunaan data panel, yaitu:

- a) Teknik penilaian data panel dapat menjelaskan heterogenitas melalui variabel individual yang lebih spesifik
- b) Data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih beragam, kolineritas yang lebih kecil antar variabel, *degree of freedom* yang lebih tinggi, dan lebih efisien
- c) Data panel lebih sesuai digunakan untuk menggambarkan dinamika perubahan dari pada studi perulangan observasi dari *cross section*
- d) Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur dampak yang tidak dapat dilakukan secara sederhana oleh observasi model data yang lain
- e) Data panel memungkinkan untuk mempelajari model yang perilakunya lebih kompleks
- f) Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin timbul akibat data terlalu banyak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan model regresi dari data panel,

yaitu Metode *Common Effect*, Metode *Fixed Effect*, dan Metode *Random Effect*.

3.4.2.1. Metode *Common Effect* (*Pooled Ordinary Least Square*)

Pengolahan data yang tepat untuk metode ini adalah dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi model. Metode ini tidak memperhatikan dimensi individual maupun waktu dan diasumsikan setiap perusahaan memiliki *slope* dan koefisien yang sama karena tidak ada perbedaan dalam dimensi *cross section*. Asumsi tersebut tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya karena karakteristik perusahaan sangat berbeda.

3.4.2.2. Metode *Fixed Effect* (*Fixed Effect Model - FEM*)

Pendekatan model *Fixed Effect* ini memasukkan variabel dummy dalam regresi data panel, sehingga disebut juga sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Walaupun mudah dalam penggunaannya, LSDV model ini memiliki beberapa permasalahan yang harus diperhatikan. *Pertama*, jika penggunaan variabel *dummy* terlalu banyak maka akan timbul permasalahan dalam derajat kebebasan (*degree of freedom*) dari regresi. *Kedua*, dengan banyaknya variabel dalam model selalu ada kemungkinan adanya multikolinearitas yang menyebabkan ketepatan estimasi dari satu atau lebih parameter menjadi sulit. *Ketiga*, bagaimanapun, pendekatan LSDV model mungkin tidak dapat mengidentifikasi dampak dari variabel *time-invariant*.

3.4.2.3. Metode *Random Effect* (*Random Effect Model - REM*)

Dalam model *Random Effect*, perbedaan karakteristik antar individu dan atau antar waktu diekspresikan dalam *error term*. Sehingga error term terdiri dari dua komponen error, yaitu komponen error *cross section* dan komponen error gabungan *cross section* dan *time series*.

Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam model *Random Effect*. *Pertama*, komponen *error* tidak berkorelasi satu dengan lainnya dan tidak ada autokorelasi antara *cross section* dan *time series*. *Kedua*, komponen *error* menjelaskan besarnya deviasi titik potong anggota panel dari nilai rata-rata.

Ketiga, komponen *error* tidak dapat diamati langsung (*unobservable* atau *latent variable*). Bagaimanapun juga asumsi homokedastik menunjukkan adanya korelasi antara komponen *error*.

Jika korelasi ini tidak diperdulikan dalam estimasi, dan regresi tetap diestimasi menggunakan OLS, maka hasil estimasinya tidak mewakili. Metode yang paling sesuai estimasi model *Random Effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) dengan asumsi homokedastik dan tidak adanya korelasi *cross sectional*.

3.4.3. Pemilihan Metode Estimasi

Pemilihan metode estimasi data panel yang tepat dapat dilakukan melalui tiga tahap uji. Pertama, uji *Chow*, untuk memilih antara model *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect*. Kedua, uji *Langrange-Multiplier* (LM), untuk memilih antara model *Pooled Least Square* atau *Random Effect*. Ketiga, uji Hausman, untuk memilih metode yang paling tepat antara *Fixed Effect* dan *Random Effect Model*.

Uji *Chow* menggunakan perhitungan *F statistics*. Apabila hasil uji *Chow* menyarankan penggunaan model *Fixed Effect*, maka perlu dilakukan uji Hausman. Jika sebaliknya, maka tidak perlu dilakukan pengujian selanjutnya.

Dalam uji Hausman digunakan perhitungan statistik *Chi-Square*. Hipotesis null dalam uji Hausman menyatakan bahwa estimator *Fixed Effect* dan *Random Effect* tidak berbeda secara substansial. Penolakan hipotesis null berarti model *Random Effect* tidak sesuai sehingga penggunaan model *Fixed Effect* disimpulkan lebih baik.

3.5. Pengujian Model

3.5.1. Pengujian Statistik

Sebelum dilakukan uji hipotesis perlu dilakukan pengujian terhadap model penelitian. Nachrowi (2002) menguraikan 3 pengujian yang dilakukan atas model regresi, yaitu:

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 mencerminkan sejauh mana model regresi yang digunakan dapat

menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Nilai R^2 berada pada interval $0 < R^2 < 1$. Semakin mendekati 1, maka model regresi yang digunakan semakin baik dan dapat diandalkan.

b) Uji F

Penggunaan uji F dimaksudkan untuk melihat pengaruh keseluruhan variabel independen atas variabel dependen dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai $F_{\text{statistik}}$ dengan F_{tabel} . Hipotesa pengujian ini dijabarkan sebagai berikut:

H_0 : variabel independen secara bersamaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Apabila *P-Value* lebih besar dari α , maka hipotesa nol ditolak yang berarti variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersamaan.

c) Uji t

Uji t dilakukan berdasarkan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk melihat signifikansi pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai $t_{\text{statistik}}$ dengan t_{tabel} . Hipotesa pengujian ini sebagai berikut:

H_0 : $\alpha_1 = 0$

H_1 : $\alpha_n \neq 0$

Apabila *P-Value* lebih kecil dari α , maka hipotesa nol ditolak yang berarti masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2. Pengujian Ekonometrika

Menurut Gujarati (2004), terdapat tiga masalah yang sering muncul dalam pengujian model regresi klasik, yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selain itu, sebagai tambahan keyakinan, dapat dilakukan uji normalitas data. Uji klasik ini bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai keandalan data atau disebut juga sebagai *best linear unbiased estimator* (BLUE).

3.5.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat gejala hubungan linear yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada dalam model regresi. Gejala multikolinearitas ini dapat diidentifikasi melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dihasilkan dari estimasi model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 1 atau lebih dari 10 regresi menunjukkan adanya multikolinearitas.

Selain itu, gejala ini dapat dilihat menggunakan *corellation matrix* (matriks korelasi). Jika terdapat korelasi antara satu variabel dengan variabel lain dengan koefisien lebih besar dari 0,8 maka ada indikasi multikolinearitas.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi klasik dari model regresi linear adalah varians residual konstan untuk setiap observasi (homoskedastisitas). Jika varians gangguan ini tidak konstan, maka dapat dikatakan terdapat gejala heteroskedastisitas. Gejala ini timbul akibat adanya varians error yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji *White* (*White's General Heteroscedascity*). Suatu model mengalami permasalahan heteroskedastisitas jika $P\text{-Value} < \alpha$ atau jika $\text{Observasi} \cdot R^2 > X^2_{df=2}$. Heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan uji Breusch-Pagan atau Cook-Weisberg (*Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity*).

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Ordinary Least Square (OLS) mengasumsikan bahwa *error term* merupakan variabel random yang tidak berkorelasi. Sebaliknya, apabila *error* atau residual antar observasi saling berkorelasi, maka model regresi terdapat indikasi autokorelasi. Model regresi yang BLUE harus bebas dari masalah autokorelasi.

Autokorelasi dapat dideteksi dengan beberapa cara, yaitu:

- a) Melalui metode grafik
- b) Melalui Uji Durbin-Watson (DW)
- c) Uji *Breusch-Godfrey* (BG) atau Uji *Langrange-Multiplier* (LM)

Pada uji ini dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika $P\text{-Value}$ signifikan atau

$(n-p) \cdot R^2 < \text{Chi-Square}$ pada signifikan level tertentu.

3.5.2.4. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk asumsi yang menyatakan bahwa error berdistribusi normal. Terdapat beberapa metode untuk menguji pelanggaran normalitas ini. Salah satunya dengan menggunakan *Histogram Normality Test* yang disediakan pada aplikasi Eviews.

Jika error berdistribusi normal, maka nilai error akan sama dengan nilai yang diharapkan atau terdapat hubungan linear yang ditunjukkan garis tren linear antara keduanya. Jika terdapat kecenderungan nonlinear maka terjadi pelanggaran normalitas.

3.6. Aplikasi Statistik

Untuk pengolahan dan pengujian data, penelitian ini menggunakan *software LibreOffice Calc 3.4.4* dan *Microsoft Excel 2003* serta program aplikasi statistik *Stata 11* dan *Eviews 7*. Aplikasi *Stata 11* dan *Eviews 7* merupakan aplikasi statistik yang menyediakan fasilitas analisis data, regresi, alat prediksi yang dapat digunakan dalam studi ekonomi meliputi analisis, evaluasi, prediksi, hingga simulasi.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Sampel Penelitian

Sampel penelitian berdasarkan daftar perusahaan publik manufaktur yang terdapat dalam klasifikasi *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification* (JASICA) untuk tahun 2009. Berdasarkan data perusahaan manufaktur JASICA 2009 tersebut, maka dikumpulkan data dalam kurun waktu 6 tahun mulai tahun 2004 hingga 2009. Laporan Keuangan perusahaan diperoleh dari *website* BEI, www.idx.co.id, dan *website* perusahaan. Skor CG diperoleh dari *Research Report on Indonesian Corporate Governance Scorecard* tahun 2005, 2007, dan 2009.

Berdasarkan *Fact Book* IDX tahun 2010, yang memuat overview tahun 2009, terdapat 131 perusahaan (786 tahun perusahaan) yang termasuk dalam klasifikasi ini. Dalam kurun waktu tahun 2004 – 2009 hanya terdapat 116 perusahaan (696 tahun perusahaan) dengan data lengkap. Perusahaan yang memakai mata uang asing dalam pelaporan keuangan (1 perusahaan – 6 tahun perusahaan) dikeluarkan dari sampel karena lebih memudahkan perbandingan dan analisis. Persyaratan variabel CETR dalam rentang 0 – 1 berimplikasi pada perusahaan yang memiliki laba negatif (66 perusahaan – 396 tahun perusahaan) dan nilai yang lebih dari satu (16 perusahaan – 96 tahun perusahaan) dikeluarkan dari sampel. Hal ini bertujuan agar nilai ETR tidak terdistorsi terlalu jauh. Perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan jumlah paket kompensasi yang diterima direksi juga tidak dapat digunakan sebagai sampel (3 perusahaan – 18 tahun perusahaan).

Dalam sampel penelitian juga ditemukan adanya *outlier* sebanyak 5 perusahaan sampel. Sesuai dengan penanganan *outlier* yang diambil dalam penelitian ini, maka sebanyak 30 tahun perusahaan dikeluarkan dari sampel penelitian.

Seleksi sampel yang telah diuraikan di atas mendapatkan 25 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Masa observasi masing-masing perusahaan adalah 6 tahun. Sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 tahun perusahaan. Rekapitulasi sampel dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Seleksi Sampel Penelitian

Sampel awal	Jumlah Tahun-Perusahaan	
131 Perusahaan manufaktur tahun 2004 – 2009		786
Dikurangi:		
(a) Data tidak lengkap	90	
(b) Pelaporan LK dengan mata uang asing	6	
(c) Laba negatif	396	
(d) Nilai <i>cash</i> ETR < 0 dan > 1	96	
(e) Tidak mengungkapkan data kompensasi	18	
(f) Outliers	30	
Jumlah pengurangan	636	636
Jumlah sampel yang digunakan		150

Sumber: Data Olahan

4.2. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	Obs.	Mean	Median	Min.	Maks.	Std. Dev.
<i>CETR</i>	150	0.344231	0.311410	0.018802	0.696234	0.136881
<i>KOMPDIR</i> *	150	16,300,000	5,520,000	383,000	251,000,000	37,500,000
<i>SAHAMDIR</i>	150	0.002980	0.000000	0.000000	0.078769	0.013082
<i>CG</i>	150	0.676027	0.664048	0.552330	0.860400	0.065193
Variabel Kontrol						
<i>FIRMSIZE</i> **	150	5,310,000	836,000	63,100	88,900,000	13,300,000
<i>MBRATIO</i>	150	2.479067	1.380000	0.090000	22.77000	3.640989
<i>DEBRATIO</i>	150	0.630569	0.521146	0.057732	3.879376	0.521066
<i>ROA</i>	150	0.122647	0.098345	0.005417	0.411557	0.087359

CETR merupakan cash effective tax rate dalam setahun yang diperoleh dari perbandingan pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak. **KOMPDIR** merupakan total kompensasi yang diterima direksi dalam setahun. **SAHAMDIR** adalah persentase kepemilikan direksi atas saham perusahaan. **CG** merupakan skor CG oleh IICD. **FIRMSIZE** merupakan total asset. **MBRATIO** adalah *market-to-book ratio* yang diperoleh dari perbandingan harga saham akhir tahun dengan harga buku ekuitas saham. **DEBRATIO** merupakan *leverage* sebagai perbandingan total liabilitas dengan ekuitas perusahaan. **ROA** merupakan return on asset sebagai perbandingan net income dengan total asset. *dalam ribuan; **dalam jutaan

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.2 merupakan statistik deskriptif untuk model penelitian dalam mengukur manajemen pajak perusahaan dengan menggunakan proksi CETR. Dalam hasil statistik deskriptif, rata-rata CETR yang merupakan proksi dari manajemen pajak menunjukkan nilai sebesar 0,344231 dengan standar deviasi 0,136881. Artinya rata-rata perusahaan membayar pajak melalui kas lebih dari 34% dari nilai laba sebelum pajak. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia dalam rentang tahun 2004 – 2008 menggunakan tingkat tertinggi 30%. Sedangkan untuk tahun 2009 menggunakan tarif 28%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pajak efektif 34% tergolong tinggi untuk kondisi di Indonesia. Hanya terdapat 9,3% sampel yang membayar pajak di bawah 20%. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 3.

Nilai rata-rata dari total kompensasi yang diterima direksi selama setahun menunjukkan Rp 16,3 Milyar per tahun. Pada variabel ini kompensasi terendah adalah Rp 383 Juta per tahun dan kompensasi tertinggi Rp 251 Milyar per tahun. Hal ini menunjukkan jumlah kompensasi antar perusahaan sangat variatif yang sangat mungkin bergantung pada jumlah direksi dan ukuran perusahaan.

Persentase kepemilikan saham perusahaan oleh direksi rata-rata sebesar 0,002980 (0,3%) dengan standar deviasi 0,013082. Tidak semua direksi memiliki saham pada perusahaan dan tidak semua perusahaan memiliki persentase kepemilikan saham direksi dalam struktur kepemilikannya. Ini ditunjukkan dengan nilai terendah 0% dan tertinggi 7,9%. Hal ini berarti kepemilikan saham oleh direksi pada perusahaan sampel rendah.

Penerapan *corporate governance* pada perusahaan sampel menunjukkan rata-rata 0,676027 dengan standar deviasi sebesar 0,065193. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel rata-rata telah menerapkan CG pada semua aspek dalam perusahaan sampai dengan 68%. Standar deviasi juga menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak terlalu bervariasi antar sampel. Hal ini berarti penerapan CG rata-rata masih cenderung rendah karena hanya memenuhi persyaratan minimal dalam CG.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*firm size*), pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan *market-to-book ratio* (*mbratio*), rasio hutang perusahaan (*debratio*), dan kinerja perusahaan yang diukur dengan

return on asset (roa). Variabel *firmsize* memiliki rata-rata Rp 5,31 Triliun dengan nilai terendah Rp 63,1 Miliar dan nilai tertinggi Rp 88,9 Triliun yang menunjukkan perusahaan sampel tergolong perusahaan yang besar dibandingkan dengan rata-rata seluruh perusahaan manufaktur sebesar Rp 2,97 Triliun. Variabel *mbratio* menunjukkan rata-rata 2,479067 dan memiliki standar deviasi 3,640989 (terendah 0,09; tertinggi 22,8) menunjukkan pertumbuhan perusahaan sangat bervariasi antar perusahaan dalam tahun penelitian tetapi masih tergolong baik. Rasio hutang perusahaan memiliki nilai rata-rata 0,630569 dengan standar deviasi 0,521066 menunjukkan perusahaan sampel menggunakan hutang yang cukup banyak dalam struktur neraca. Variabel *roa* memiliki rata-rata 0,122647 dengan standar deviasi 0,087359 yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sampel tergolong baik.

4.3. Pemilihan Metode Estimasi

Terdapat 3 pendekatan metode estimasi yang dapat digunakan untuk memilih metode estimasi yang paling tepat dalam penelitian ini, yaitu metode *Ordinary Least Square (OLS)*, metode *Fixed Effect (FE)*, dan metode *Random Effect (RE)*. Untuk menentukan metode mana yang lebih baik, maka dilakukan pengujian ekonometrika. Penelitian ini menggunakan uji *Chow* dan uji *Hausman*.

4.3.1. Uji *Chow*

Uji *Chow* merupakan pengujian ekonometrika untuk memilih metode yang paling tepat antara metode OLS atau FE. Pengujian ini menggunakan aplikasi statistik *Eviews 7*. Hipotesis yang mendasari uji *Chow* adalah:

H_0 : Menggunakan metode OLS

H_1 : Menggunakan metode FE

pada hasil pengujian, hipotesis H_0 dapat ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari α .

Dalam pengolahan program *Eviews 7* (lampiran 4), uji *chow* dilihat dari probabilitas *Cross-section F* output regresi FE. Berdasarkan tabel, uji *Chow* memiliki nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari α (0,05). Sehingga uji tersebut menolak H_0 yang berarti metode FE lebih baik digunakan untuk mengestimasi

model ini.

Karena uji *Chow* menyarankan penggunaan metode FE, maka kita harus melakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji *Hausman*.

4.3.2. Uji *Hausman*

Uji Hausman merupakan pengujian ekonometrika untuk memilih estimasi yang paling tepat antara metode FE dan metode RE. Pengujian *Hausman* memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan metode RE

H_1 : Menggunakan metode FE

pada hasil pengujian, hipotesis H_0 dapat ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari α .

Berdasarkan pengujian Hausman pada lampiran 5, nilai probabilitas menunjukkan nilai sebesar 0,1544 lebih besar dari nilai α (0,05), sehingga hipotesis menerima H_0 . Hal ini berarti model penelitian lebih tepat diestimasi menggunakan metode *Random Effect* (RE).

4.4. Pengujian Asumsi Klasik Ekonometrika

4.4.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat adanya keterkaitan yang kuat antar variabel independen dalam penelitian. Dalam program Stata 11, uji multikolinearitas dapat dilihat pada nilai VIF dan 1/VIF (*tolerance statistic*). Jika nilai VIF lebih dari 10 dan 1/VIF kurang dari 0.1, maka model mengindikasikan adanya multikolinearitas.

Hasil pengujian pada tabel 4.3 menunjukkan hasil VIF kurang dari 10 dan *tolerance statistic* lebih dari 0,1 untuk semua variabel independen dalam penelitian ini. Sehingga disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengandung masalah multikolinearitas yang serius.

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah model memiliki varians yang konstan untuk setiap observasi yang dilakukan. Apabila varians

tersebut tidak konstan maka terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model penelitian. Pengujian heteroskedastisitas ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Varians konstan

H_1 : Varians tidak konstan

pada hasil pengujian, hipotesis H_0 dapat ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari α .

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	VIF	1/VIF
<i>KOMPDIR</i>	5.63	0.177754
<i>FIRMSIZE</i>	5.61	0.178271
<i>ROA</i>	2.32	0.427059
<i>MBRATIO</i>	2.04	0.490045
<i>CG</i>	1.67	0.597599
<i>DEBRATIO</i>	1.38	0.725718
<i>SAHAMDIR</i>	1.17	0.853485
Mean VIF	2.83	

Sumber: Data Olahan

Pengujian heteroskedastisitas tidak dilakukan pada model yang menggunakan metode estimasi RE. Karena metode estimasi RE sudah mengasumsikan *Generalized Least Square* (GLS) dalam regresinya.

Untuk membuktikan hal tersebut, deteksi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui probabilitas *R-squared* pada output regresi model RE melalui aplikasi *Eviews 7* (Lampiran 6).

Nilai *R-squared* menunjukkan hasil sebesar 0,170372 lebih besar dari nilai α (0,05). Hal ini membuktikan bahwa model estimasi RE bebas dari masalah heterokedastisitas.

4.4.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah model mengandung korelasi antara satu periode dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini dapat

dilakukan dengan berbagai cara. Hipotesis pengujian autokorelasi sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_1 : Ada autokorelasi

pada hasil pengujian, hipotesis H_0 dapat ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari α .

Sama seperti uji heteroskedastisitas, pengujian autokorelasi tidak dilakukan pada model yang menggunakan estimasi RE untuk sebab yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai *Durbin-Watson Stat* pada lampiran 6 menunjukkan hasil sebesar 2,058852 yang berada pada kisaran untuk menerima H_0 ($1,5 < DW Stat < 2,5$).

4.4.4. Uji Normalitas

Hipotesis pengujian normalitas sebagai berikut:

H_0 : *Error* berdistribusi normal

H_1 : *Error* tidak berdistribusi normal

pada hasil pengujian, hipotesis H_0 dapat ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari α .

Hasil *Histogram Normality Test* pada lampiran 7 menunjukkan nilai probability 0,861015 lebih besar dari α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan, pada model penelitian ini, *error* berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.5. Pengujian Model

Pengujian model regresi dilakukan melalui pengujian *F* dan *Adjusted R-squared*. Uji *F* dilakukan untuk mengetahui kelayakan model yang akan digunakan dalam hipotesis penelitian. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan α , maka variabel independen tidak dapat memprediksi variabel dependen secara tepat. Sedangkan *Adjusted R-squared* digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen dalam penelitian.

Hasil regresi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan fungsi *robust* dalam *Eviews 7*, sehingga menunjukkan hasil yang terbebas dari masalah BLUE (lampiran 8).

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas *F*

sebesar 0,000336 dan lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan variabel independen, yaitu kompensasi direksi, kepemilikan saham direksi, skor CG, ukuran perusahaan, pertumbuhan (*market-to-book ratio*), rasio hutang, dan kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen manajemen pajak (CETR) secara signifikan. Sehingga model penelitian ini dapat dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian.

Nilai *Adjusted R-squared* pada model penelitian adalah 12,95% (*Adjusted R-squared* = 0,129475). Hal ini berarti variabel independen yang terdapat dalam model mampu menjelaskan sebesar 12,95% pengaruh terhadap variabel dependen. Sisanya sebesar 87,05% dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.6. Pengujian Hipotesis

4.6.1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel 4.4, variabel KOMPDIR memiliki koefisien positif sebesar 0,050573 dengan probabilitas 0,0007 (signifikan pada 1%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kenaikan satu poin dalam tingkat kompensasi direksi akan menghasilkan kenaikan pembayaran pajak sebesar 5,1%. Hal ini berlawanan dengan prediksi hipotesis.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) yang mengungkapkan hasil sebaliknya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa tingkat kompensasi direksi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan terhadap pembayaran pajak perusahaan (CETR). Sedangkan Armstrong et al. (2012) hanya membuktikan pengaruh tersebut pada kompensasi yang diberikan kepada direksi yang khusus menangani masalah perpajakan.

Tetapi penelitian ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Mereka menemukan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif perusahaan berpengaruh negatif terhadap usaha manajemen pajak. Sehingga perusahaan tidak berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Berdasarkan hal yang dijabarkan sebelumnya, hipotesis 1 (H_1) yang

menyatakan tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak perusahaan tidak terbukti (ditolak).

Tabel 4.4
Hasil Regresi Model

	Variabel Dependen	
	Prediksi Arah	<i>CETR</i>
<i>Intercept</i>		0.621365 (0.0766)
<i>KOMPDIR</i>	-	0.050573 (0.0007)***
<i>SAHAMDIR</i>	-	-0.806180 (0.0030)***
<i>CG</i>	-	0.542731 (0.0419)**
<i>FIRMSIZE</i>	-	-0.061332 (0.0003)***
<i>MBRATIO</i>	+	0.009798 (0.0017)***
<i>DEBRATIO</i>	+	0.013645 (0.6553)
<i>ROA</i>	+	-0.888296 (0.0000)***
R-Squared		0.170372
Adjusted R-squared		0.129475
F-statistic		4.165861
p-Value (F-Statistic)		0.000336***
N (tahun-perusahaan)		150
<p><i>CETR</i> merupakan <i>cash effective tax rate</i> dalam setahun yang diperoleh dari perbandingan pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak. <i>KOMPDIR</i> merupakan logaritma natural dari total kompensasi yang diterima direksi dalam setahun. <i>SAHAMDIR</i> adalah persentase kepemilikan direksi atas saham perusahaan. <i>CG</i> merupakan skor CG oleh IICD. <i>FIRMSIZE</i> merupakan logaritma natural dari total asset. <i>MBRATIO</i> adalah <i>market-to-book ratio</i> yang diperoleh dari perbandingan harga saham akhir tahun dengan harga buku ekuitas saham. <i>DEBRATIO</i> merupakan <i>leverage</i> sebagai perbandingan total liabilitas dengan ekuitas perusahaan. <i>ROA</i> merupakan <i>return on asset</i> sebagai perbandingan <i>net income</i> dengan total asset.</p> <p>Angka dalam kurung merupakan probabilitas (<i>two-tail</i>) dari <i>t-statistic</i>, dimana *** signifikan pada 1%; ** signifikan pada 5%; * signifikan pada 10%.</p>		

Sumber: Data Olahan

4.6.2. Pengujian Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kesimpulan ini ditunjukkan variabel SAHAMDIR pada Tabel 4.4 dengan nilai koefisien -0.806180 dan probabilitas 0.0030 (signifikan pada 1%).

Hal ini dikarenakan tujuan antara eksekutif perusahaan dengan para pemegang saham untuk meningkatkan nilai pemegang saham adalah sesuai dengan konsep penyalarsan kepentingan antar manajemen dan pemegang saham (*interest alignment*). Dengan menurunkan pembayaran pajak perusahaan maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat dan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham. Direksi yang memiliki saham perusahaan juga akan menerima manfaat kenaikan nilai saham tersebut. Hal ini memberikan 2 manfaat kepada eksekutif perusahaan, yaitu peningkatan kompensasi dan peningkatan nilai saham yang dimiliki.

Berdasarkan alasan tersebut, hipotesis H_2 yang menyatakan kepemilikan saham oleh direksi berpengaruh negatif terhadap pajak perusahaan terbukti (diterima).

4.6.3. Pengujian Hipotesis 3 (H_3)

Penerapan mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skor CG. Penggunaan skor CG dalam penelitian karena penilaian mekanisme CG telah menjadi sebuah standar pengukuran bagi setiap perusahaan.

Berdasarkan tabel 4.4, variabel CG berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel CETR. Bukti ini ditunjukkan dengan koefisien dan nilai probabilitas sebesar 0,542731 dan 0,0419 (signifikan pada 5%). Hal ini menunjukkan gambaran bahwa penerapan CG dalam perusahaan meningkatkan pembayaran pajak perusahaan. Hasil ini berlawanan dengan prediksi penelitian.

Beberapa penelitian sebelumnya tidak menemukan hasil yang signifikan terhadap hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan usaha yang dilakukan terhadap pajak perusahaan. Beberapa penelitian tersebut dilakukan oleh

Minnick dan Noga (2010), Sari (2010), serta Desai dan Dharmapala (2006).

Penelitian Desai dan Dharmapala (2006) selanjutnya menjelaskan bahwa tindakan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan akan dilakukan oleh perusahaan dengan tingkat penerapan CG yang buruk. Hal ini dapat memberikan kejelasan bahwa sampel dalam penelitian ini mempunyai rata-rata skor CG 68% masih berada dalam kategori *fair* dalam menerapkan persyaratan minimum CG.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan CG berpengaruh negatif terhadap pajak perusahaan tidak terbukti (ditolak).

4.6.4. Hasil Terhadap Variabel Kontrol

Variabel FIRMSIZE menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap CETR. Pengaruh ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,061332 dan nilai probabilitas 0,0003 (signifikan pada 1%). Hasil yang ditunjukkan sesuai dengan prediksi awal penelitian.

Variabel kontrol MBRATIO juga menunjukkan hasil yang signifikan. Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembayaran pajak perusahaan. Hal ini diperlihatkan dengan nilai koefisien 0,009798 dan nilai probabilitas 0,0017 (signifikan pada 1%). Arah dari koefisien variabel ini sesuai dengan prediksi awal yang ditetapkan.

Hasil yang ditunjukkan variabel DEBRATIO memperlihatkan arah yang sesuai dengan prediksi awal terhadap CETR (0,013645). Tetapi hubungan ini tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari nilai α yang ditetapkan dalam pengujian ($0,6553 > \alpha$).

Sedangkan untuk variabel ROA, memiliki pengaruh yang sama dengan ukuran perusahaan. Variabel ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien -0,888296 dan nilai probabilitas 0,0000 (signifikan pada 1%). Dengan demikian pengaruh kinerja perusahaan tidak sesuai dengan prediksi awal penelitian.

4.7. Pembahasan Penelitian

4.7.1. Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Manajemen pajak yang dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dianggap sebagai suatu kebijakan yang berpihak pada pemegang saham. Pemberian kompensasi terhadap direksi bermaksud untuk menstimulasi eksekutif perusahaan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Variabel kompdir menunjukkan arah positif yang signifikan terhadap CETR dan merupakan suatu yang kontradiktif dengan asumsi penelitian ini.

Menurut Desai dan Dharmapala (2006), buruknya kualitas *corporate governance* menyebabkan setiap peningkatan penyelarasan kepentingan antara eksekutif perusahaan dan pemegang saham menjadi alasan utama yang mendorong manajer mengurangi tingkat penghindaran pajak. Tetapi hubungan ini tidak berlaku pada perusahaan dengan *corporate governance* yang baik. Pada perusahaan yang mengelola CG dengan baik, penyelarasan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif melalui peningkatan kompensasi tidak berlaku. Sehingga peningkatan terhadap kompensasi direksi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak.

Dengan demikian pemberian kompensasi yang tinggi terhadap direksi bukan merupakan suatu cara yang efektif dalam meningkatkan usaha manajemen pajak dengan memperkecil pembayaran pajak. Hal ini disebabkan adanya mekanisme lain yang lebih tepat diterapkan untuk mengelola manajemen pajak perusahaan.

4.7.2. Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Kaitan antara kepemilikan saham direksi dengan pembayaran pajak perusahaan menunjukkan hubungan negatif yang signifikan. Kesimpulan ini memberikan bukti yang kuat terhadap hipotesis 2 (H_2) yang diuji dalam penelitian.

Kepemilikan manajerial dalam struktur saham perusahaan dianggap mampu menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif perusahaan. Hubungan ini awalnya telah dibuktikan oleh Jensen dan Meckling (1976) pada penelitian mereka. Sejak saat itu, telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa dengan adanya kepemilikan saham direksi akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hu dan Zhou (2008) juga menemukan bukti yang signifikan

dan positif atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan di China. Hermalin dan Weisbach (1991) serta Core dan Larcker (2002) juga membuktikan hubungan yang serupa.

Dalam penelitian ini adanya kepemilikan saham direksi mendorong para eksekutif untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satunya dengan manajemen pajak yang baik melalui pengurangan pembayaran pajak perusahaan. Karena dengan usaha tersebut, eksekutif tidak hanya menjalankan keinginan para pemegang saham tetapi juga memberi manfaat atas kepentingan mereka sendiri melalui *bottom-line performance* yang baik.

4.7.3. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) tidak menemukan hubungan signifikan antara penerapan mekanisme corporate governance dengan pengelolaan pajak perusahaan. Penelitian mereka mendukung hasil penelitian Wintoki et al. (2010) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara CG dan kinerja.

Sedangkan Sari (2010), dalam penelitiannya, menemukan bahwa penerapan *corporate governance* dapat membatasi tindakan pajak agresif perusahaan sehingga menjadikan pembayaran pajak menjadi lebih besar.

Penelitian ini mengukur penerapan CG melalui skor CG. Penerapan CG perusahaan sampel berkisar pada skor 68%. Skor CG yang dikeluarkan oleh IICD mempunyai 4 kriteria performa CG pada satu perusahaan, yaitu *Excellent* (rentang 90-100%), *Good* (rentang 80-89%), *Fair* (rentang 60-79%), *Poor* (kurang dari 60%). Sehingga penerapan CG dalam perusahaan sampel berada dalam kategori *Fair* dan tidak dapat dikatakan buruk (*poor*) walaupun masih tergolong rendah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan CG dalam perusahaan tidak mempengaruhi usaha manajemen untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan dan mempunyai hubungan sebaliknya. Hubungan positif dan signifikan ini dapat terjadi karena penerapan CG dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak. Perusahaan lebih berhati-hati karena terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak. Selain itu, hal ini juga dapat terjadi karena

perusahaan melakukan ekstensifikasi usaha dan mengalami pertumbuhan yang baik. Sehingga manajemen tidak terlalu fokus pada usaha memperkecil pembayaran pajak.

4.7.4. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Bukti ini memperlihatkan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka semakin efisien pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008) dan Lannis dan Richardson (2011). Penelitian mereka menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan akan berbanding terbalik dengan pembayaran pajak perusahaan.

Penggunaan hutang oleh perusahaan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang tidak memiliki bukti yang cukup untuk mempengaruhi pengelolaan pajak. Tetapi arah koefisien dari penelitian ini sesuai dengan prediksi semula. Sari (2010) dalam penelitiannya juga menemukan hubungan yang serupa. Mengutip Sari (2010), hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-46/PJ.4/1995. Butir 4 dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa:

- (a) Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
- (b) Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya (Direktur Jenderal Pajak, 1995).

Pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap manajemen pajak. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan

bahwa perusahaan yang pertumbuhan operasionalnya tinggi cenderung tidak terlalu mempermasalahkan usaha efisiensi pajak karena usaha ekstensifikasi cenderung memiliki pembayaran pajak yang besar pula. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Bankman (1994) dan Dyreng et al. (2008).

Sedangkan kinerja perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Hubungan ini sangat bertolak belakang dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) serta Armstrong et al. (2012) yang menemukan bukti positif dan signifikan antara ROA dan pembayaran pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2008). Penelitian mereka membuktikan bahwa pembayar pajak tingkat medium dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah yang dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar pada *Research and Development* untuk pengembangan usaha. Karena data penelitian ini pembayaran pajak rata-rata sebesar 34% digolongkan tinggi, sehingga hubungan negatif ini mungkin disebabkan karena alasan yang diungkapkan oleh Dyreng et al. (2008), mengingat hubungan terhadap pertumbuhan perusahaan pada paragraf sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini menguji tentang pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, serta ingin mengungkapkan sejauh mana mekanisme *corporate governance* berupa kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan. Pengujian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks JASICA Bursa Efek Indonesia 2009 selama rentang waktu 2004 – 2009 (terdapat 150 observasi perusahaan tahun). Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian di Indonesia yang menghubungkan kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial sebagai salah satu mekanisme CG dengan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

Tingkat kompensasi kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Sehingga apabila dilihat sebagai suatu kesatuan manajemen pajak, pemberian tingkat kompensasi direksi yang ada di Indonesia tidak menyebabkan efisiensi manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi bukan cara yang efektif untuk mendorong usaha manajemen pajak perusahaan. Karena terdapat cara yang lebih efektif yang memberikan pengaruh untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan.

Pengaruh kepemilikan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan sangat signifikan dan negatif. Kepemilikan saham oleh direksi mampu menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan eksekutif perusahaan. Sehingga hal ini mendorong para manajer melakukan upaya efisiensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini mengelola manajemen pajak dengan memperkecil pembayaran pajak perusahaan. Sehingga kepemilikan direksi lebih efektif untuk mendorong usaha manajemen pajak perusahaan.

Penerapan CG mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam terhadap pembayaran pajak. Semakin tinggi skor CG yang diperoleh perusahaan, maka tingkat pembayaran pajak pun semakin tinggi. Skor CG menunjukkan

tingkat kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan asas yang disusun oleh OECD. Sehingga penerapan CG dapat mencegah perusahaan melakukan *tax avoidance* yang berlebihan. Perusahaan lebih berhati-hati dalam pengelolaan manajemen pajaknya. Akibatnya usaha tersebut tidak dilakukan secara agresif. Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga berpengaruh atas pajak perusahaan. Sehingga manajemen tidak berfokus pada usaha minimalisasi pembayaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang kuat atas hubungan mekanisme *corporate governance*, termasuk paket kompensasi direksi terhadap manajemen pajak perusahaan. Walaupun tidak semua hasil menunjukkan arah yang sesuai dengan hipotesis, pengujian penelitian telah memberikan deskripsi bagaimana hubungan paket kompensasi terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Besarnya kompensasi direksi bukan merupakan hal yang efektif terhadap usaha mengurangi pajak perusahaan. Sementara, kepemilikan saham oleh direksi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap usaha mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya kompensasi kepada direksi tidak dapat dijadikan suatu insentif untuk meminimalisasi pajak. Hal ini pun didukung karena penerapan CG oleh perusahaan dirasakan cukup untuk mencegah manajer untuk melakukan usaha manajemen pajak yang agresif untuk mengurangi pembayaran pajak.

Sedangkan kepemilikan manajerial, dalam hal ini kepemilikan saham direksi, mampu mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai yang diharapkan oleh pemegang saham. Hal ini sejalan dengan konsep penyelarasan antara kepentingan manajer sebagai agen dan para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan.

Perusahaan harus mengevaluasi kebijakan agar pemberian kompensasi kepada direksi dan kepemilikan direksi dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Melalui Komite Remunerasi, perusahaan dapat mengukur tingkat kompensasi yang sesuai agar mampu menstimulasi manajemen

meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak. Hal ini dikarenakan dampak terhadap manajemen pajak akan terasa dalam jangka panjang bagi perusahaan.

Sedangkan bagi pemerintah, sebagai regulator penerapan pajak dan CG, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CG yang telah ada belum dapat diterapkan secara maksimal oleh perusahaan. Pemerintah perlu mengevaluasi peraturan penerapan CG oleh perusahaan sehingga menjadi lebih baik. Selain itu pemerintah perlu mengatur keselarasan antara penerapan CG dan pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini agar kebijakan CG dan pajak saling mendukung dan menciptakan suatu kondisi yang sehat bagi perusahaan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

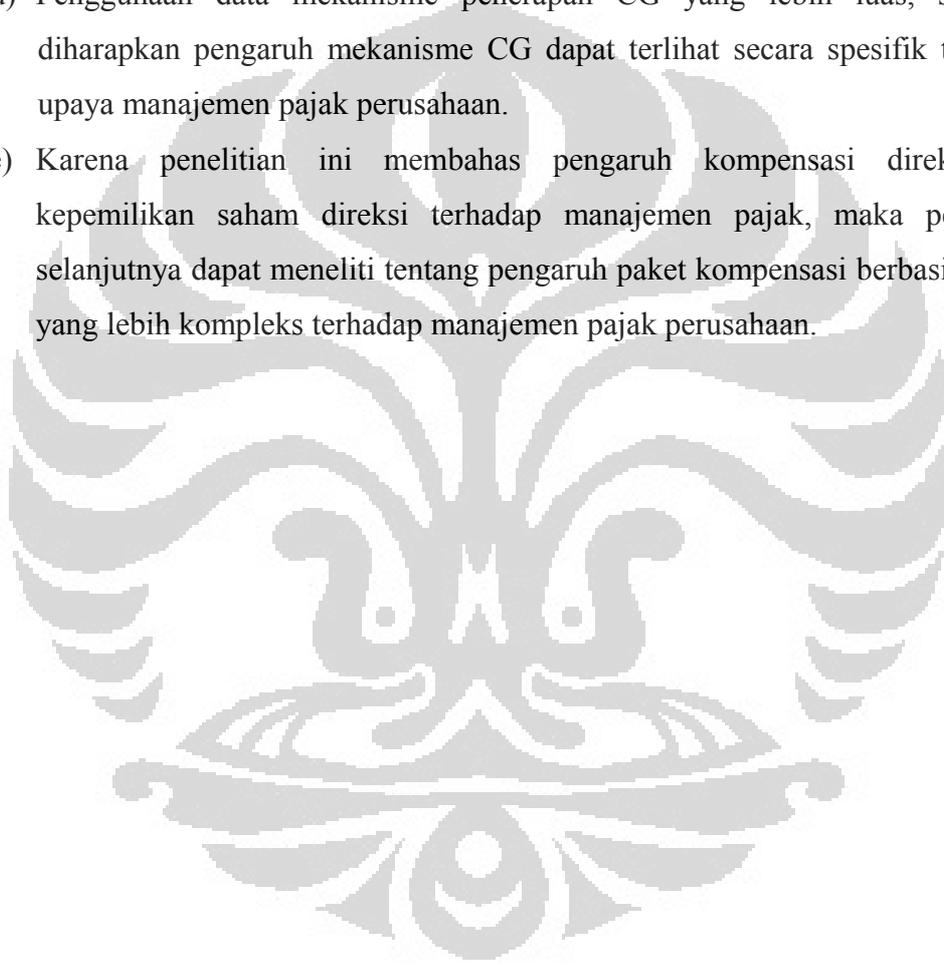
- a) Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk industri lain di Indonesia
- b) Penelitian hanya menggunakan *cash* ETR sebagai satu-satunya proksi manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.
- c) Penelitian ini hanya memilih sampel perusahaan yang mengungkapkan kompensasi terhadap direksi. Pengungkapan kompensasi terhadap direksi belum menjadi informasi yang wajib diungkapkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.
- d) Penelitian ini hanya menggunakan perhitungan total kompensasi kas terhadap dewan direksi sebagai salah satu proksi atas kompensasi yang diterima. Karena perusahaan sampel hanya mengungkapkan total keseluruhan kompensasi tanpa ada rincian lebih detail.
- e) Penelitian masih menggunakan skor CG sebagai salah satu mekanisme CG. Ketersediaan skor CG sangat terbatas karena tidak semua perusahaan, untuk setiap tahun, termasuk ke dalam survey yang dilakukan IICD.

5.4. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

- a) Sebaiknya penggunaan sampel lebih diperluas untuk seluruh perusahaan pada Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan

keadaan di Indonesia.

- b) Menggunakan proksi selain *cash ETR* untuk mengukur aktivitas manajemen pajak perusahaan. Perhitungan *book-tax differences* dan *tax sheltering* dapat dijadikan sebagai proksi alternatif.
- c) Penggunaan *equity incentives* atau *pay-performance sensitivity* dijadikan proksi untuk mengukur kompensasi direksi karena mengukur kompensasi berdasarkan ekuitas.
- d) Penggunaan data mekanisme penerapan CG yang lebih luas, sehingga diharapkan pengaruh mekanisme CG dapat terlihat secara spesifik terhadap upaya manajemen pajak perusahaan.
- e) Karena penelitian ini membahas pengaruh kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi terhadap manajemen pajak, maka penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang pengaruh paket kompensasi berbasis saham yang lebih kompleks terhadap manajemen pajak perusahaan.



DAFTAR REFERENSI

- Alijoyo, A., & Zaini, S. (2004). *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Armstrong, C. S., Blouin, J.L., & Larcker, D.F. (2012). The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53, 391-411.
- Barton, D., Coombes, P., & Wong, S.C. (2004). Asia's Governance Challenge. *McKinsey Quarterly*, 2, 55-61.
- Bergstresser, D., & Philippon, T. (2006). CEO Incentives and Earnings Management. *Journal of Financial Economics*, 80, 511-529.
- Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance. *Journal of Corporate Finance*, 14, 257-273.
- Christian, F. (2008). Implementasi Manajemen Pajak Terhadap Kewajiban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT X). Tesis Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J.P.H., & Lang, L.H.P. (1999). Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia. *World Bank Policy Research Working Paper*, 2088.
- Core, J.E., & Larcker, D.F. (2002). Performance Consequences of Mandatory Increase in Executive Stock Ownership. *Journal of Financial Economics*, 64, 317-340.
- Desai, M.A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Dwitridinda. (2007). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami *Financial Distress*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83 (1), 61-82.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. *What is Corporate Governance*. 9 Januari 2012. www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html
- Graham, J.R. (2003). Taxes and Corporate Finance: A Review. *The Review of Financial Studies*, 16 (4), 1075-1129.
- Graham, J.R., & Tucker, A.L. (2006). Tax Shelter and Corporate Debt Policy. *Journal of Financial Economics*, 81 (3), 563-594.
- Gujarati, D.N. (2004). *Basic Econometrics* (Fourth Edition). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Hermalin, B., & Weisbach, M. (1991). The Effect of Board Composition and Direct Incentives on Firm Performance. *Financial Management*, 21 (4), 101-112.

- Hu, Y., & Zhou, X. (2008). The Performance Effect of Managerial Ownership: Evidence From China. *Journal of Banking and Finance*, 32, 2099-2110.
- Indonesian Stock Exchange. (2010). *IDX Fact Book 2010*. Jakarta: Compiled by Research Division.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 35-60.
- Karayan, J.E., & Swenson, C.W. (2007). *Strategic Business Tax Planning*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Karayan, J.E., Swenson, C.W., & Neff, J.W. (2002). *Strategic Corporate Tax Planning*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30, 50-70.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance*, 16, 703-718.
- Monks, R.A.G., & Minow, N. (2004). *Corporate Governance* (Third Edition). Oxford: Blackwell Publishing.
- Nachrowi, D.N. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Phillips, J.D. (2003). Corporate Tax-Planning Effectiveness: The Role of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review*, 78 (3), 847-874.
- Rego, S.O., & Wilson, R. (2009). Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance. *Working Paper*, University of Iowa.
- Sari, D.K. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. Tesis Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Sheikh, S., & Rees, W. (1995). *Corporate Governance and Corporate Control*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Wintoki, M.B., Linck, J.S., & Netter, J.M. (2010). Endogeneity and The Dynamics of Corporate Governance. *Working Paper*, University of Kansas.
- Zimmerman, J. (1983). Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5 (2), 119-149.

Lampiran 1: Daftar Nama Perusahaan Sampel

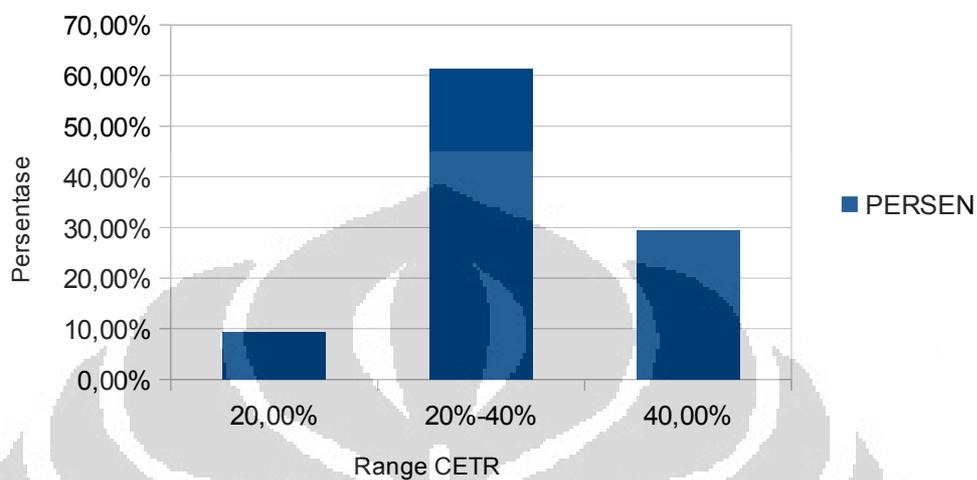
No.	Kode	Nama Perusahaan
1	AQUA	PT Aqua Golden Mississippi Tbk
2	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
3	ASII	PT Astra International Tbk
4	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
5	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
6	EKAD	PT Ekadharma International Tbk
7	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
8	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
9	JPRS	PT Jaya Pari Steel Tbk
10	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
12	LION	PT Lion Metal Works Tbk
13	MERK	PT Merck Tbk
14	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk
15	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
16	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
17	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk
18	SMGR	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
19	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
20	SOBI	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
21	SQBI	PT Taisho Pharmaceutical Tbk
22	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
23	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
24	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
25	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

Lampiran 2: Hasil Statistik Deskriptif

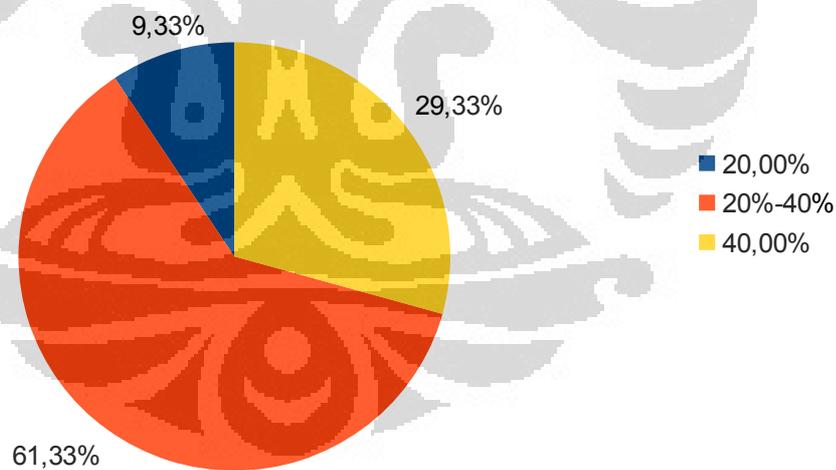
	CETR	KOMPDIR	SAHAMDIR	CG	FIRMSIZE	MBRATIO	DEBRATIO	ROA
Mean	0.344231	22.49495	0.002980	0.676027	27.77050	2.479067	0.630569	0.122647
Median	0.311410	22.43180	0.000000	0.664048	27.45220	1.380000	0.521146	0.098345
Maximum	0.696234	26.24963	0.078769	0.860400	32.11896	22.77000	3.879376	0.411557
Minimum	0.018802	19.76228	0.000000	0.552330	24.86777	0.090000	0.057732	0.005417
Std. Dev.	0.136881	1.335570	0.013082	0.065193	1.657992	3.640989	0.521066	0.087359
Skewness	0.485312	0.359691	4.792917	0.220735	0.568269	3.942482	2.690041	1.554839
Kurtosis	2.674343	3.136406	24.73851	2.487274	2.758042	19.18280	14.42458	5.207364
Jarque-Bera	6.551026	3.350732	3527.819	2.861153	8.439134	2025.347	996.6642	90.89094
Probability	0.037797	0.187240	0.000000	0.239171	0.014705	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	51.63465	3374.242	0.446940	101.4040	4165.575	371.8600	94.58540	18.39711
Sum Sq. Dev.	2.791738	265.7782	0.025498	0.633266	409.5915	1975.263	40.45494	1.137109
Observations	150	150	150	150	150	150	150	150

Lampiran 3: Sebaran Tingkat Pembayaran Pajak

Grafik Batang



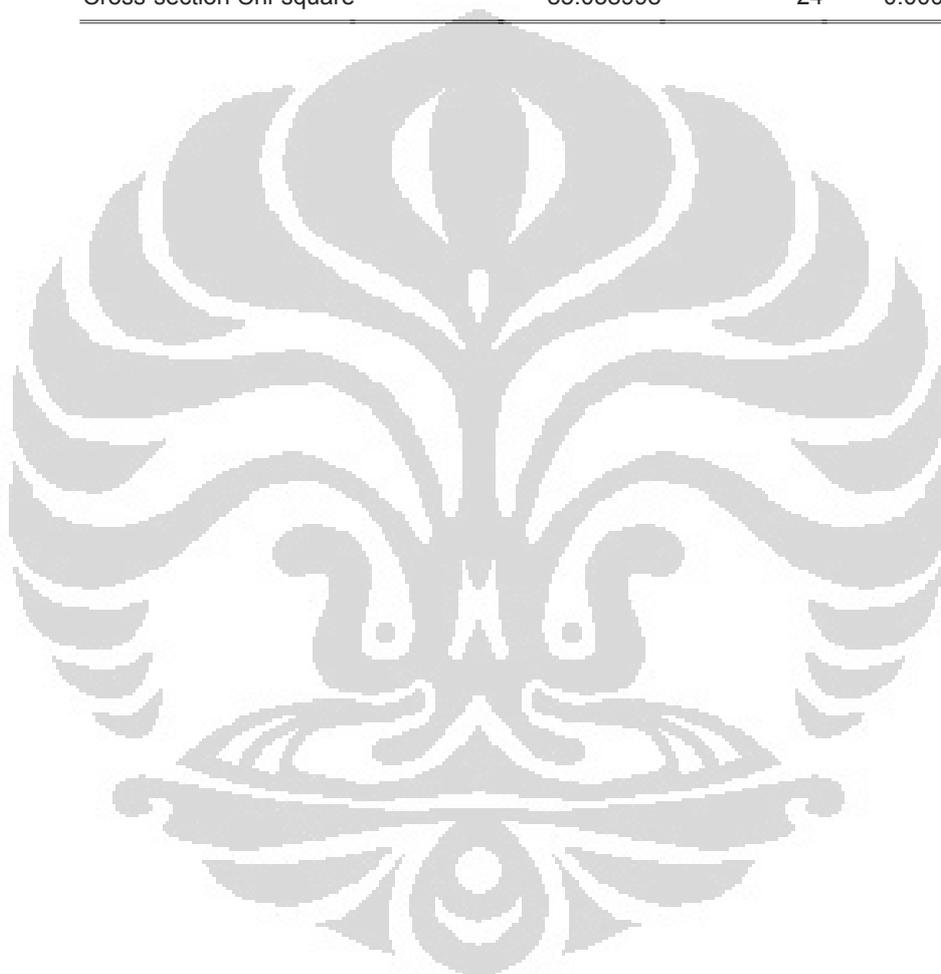
Grafik Pie



Lampiran 4: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: REGRESI
Test cross-section fixed effects

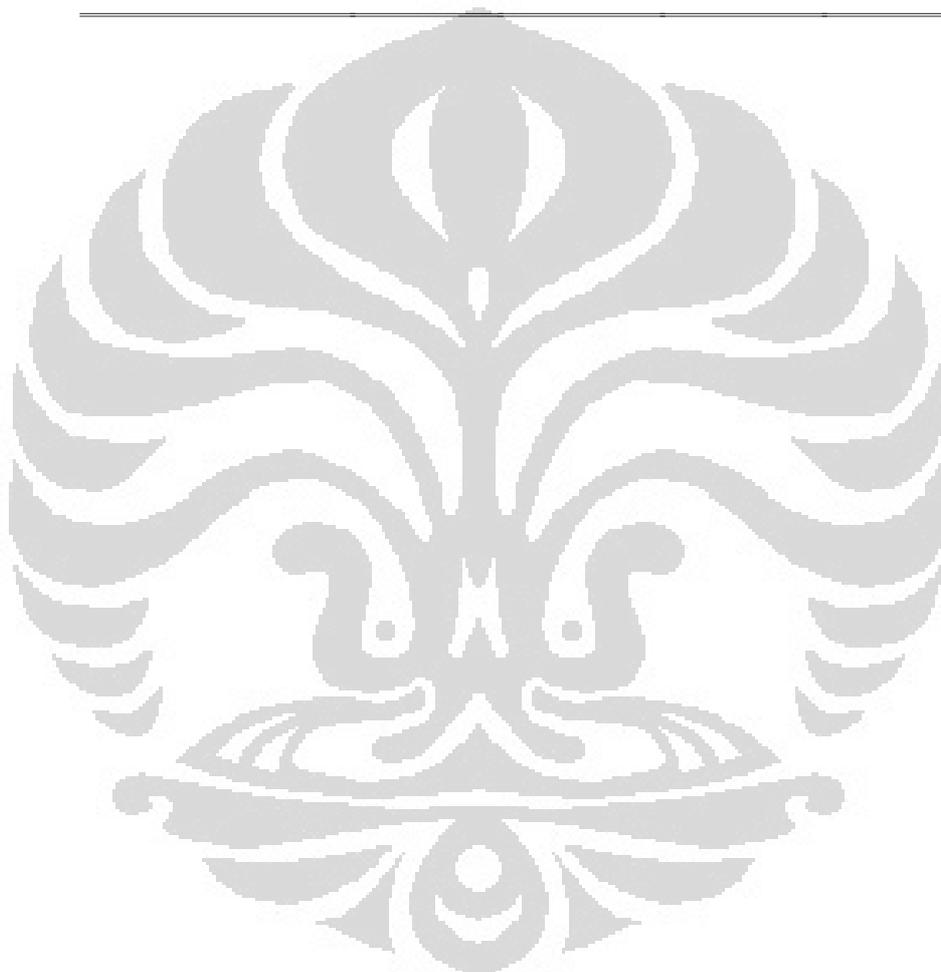
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.750634	(24,118)	0.0000
Cross-section Chi-square	85.038998	24	0.0000



Lampiran 5: Hasil Uji Hausman

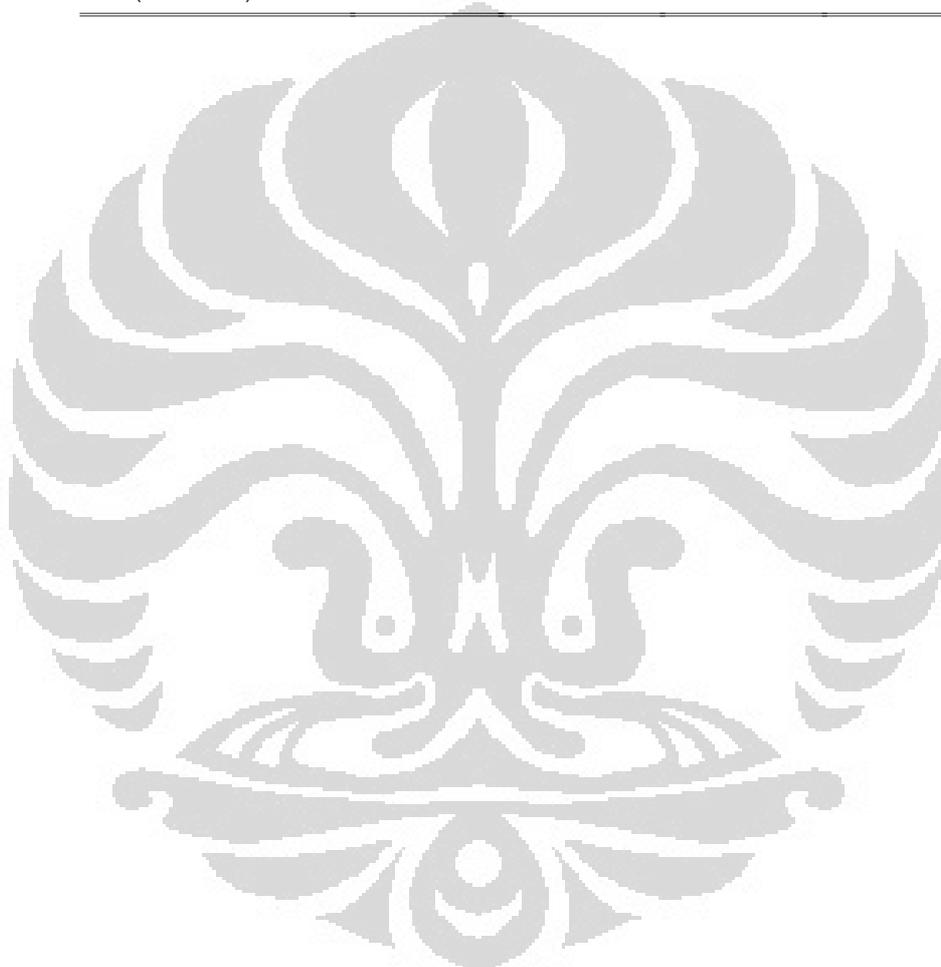
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REGRESI
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.655611	7	0.1544

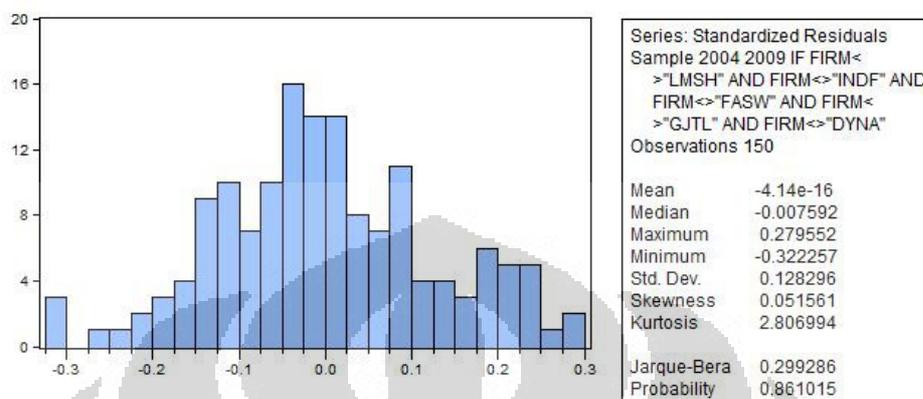


Lampiran 6: Deteksi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.170372	Mean dependent var	0.164295
Adjusted R-squared	0.129475	S.D. dependent var	0.116061
S.E. of regression	0.108287	Sum squared resid	1.665104
F-statistic	4.165861	Durbin-Watson stat	2.058852
Prob(F-statistic)	0.000336		



Lampiran 7: Histogram Normality Test



Lampiran 8: Hasil Regresi Model

Dependent Variable: CETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/14/12 Time: 11:10
 Sample: 2004 2009 IF FIRM<>"LMSH" AND FIRM<>"INDF" AND
 FIRM<>"FASW" AND FIRM<>"GJTL" AND FIRM<>"DYNA"
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 150
 Swamy and Arora estimator of component variances
 White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.621365	0.348299	1.784000	0.0766
KOMPDIR	0.050573	0.014555	3.474519	0.0007
SAHAMDIR	-0.806180	0.267178	-3.017393	0.0030
CG	0.542731	0.264311	2.053378	0.0419
FIRMSIZE	-0.061332	0.016426	-3.733849	0.0003
MBRATIO	0.009798	0.003068	3.194157	0.0017
DEBRATIO	0.013645	0.030497	0.447417	0.6553
ROA	-0.888296	0.141808	-6.264080	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.080366	0.3610
Idiosyncratic random		0.106920	0.6390

Weighted Statistics			
R-squared	0.170372	Mean dependent var	0.164295
Adjusted R-squared	0.129475	S.D. dependent var	0.116061
S.E. of regression	0.108287	Sum squared resid	1.665104
F-statistic	4.165861	Durbin-Watson stat	2.058852
Prob(F-statistic)	0.000336		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.121509	Mean dependent var	0.344231
Sum squared resid	2.452517	Durbin-Watson stat	1.397830